



Kata Pengantar

“Membantu Gubernur Dalam Menentukan Kebijakan
Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah
Dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
Berlaku”

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2022-2026. LKJIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan review atas laporan kinerja, penyusunan laporan laporan kinerja merupakan kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKJIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

*Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh*

Jambi, Januari 2024

Kepala,
Bappeda Provinsi Jambi

Ir. AGUS SUNARYO, M.Si

Pembina Utama Madya

Nip. 19660814 199303 1 004

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi Tahun 2023, merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja dilingkungan Bappeda Provinsi Jambi termasuk pengukuran dan evaluasi serta hasil analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2023. Laporan Kinerja ini juga menjelaskan berkaitan dengan : (i) Perencanaan dan Pengendalian yang dilakukan pada tahun 2023, (ii) Capaian kinerja atas Perencanaan dan Pengendalian yang telah ditetapkan; serta (iii) Realisasi anggaran yang dicapai masing-masing program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi di tahun 2023 dalam mewujudkan tujuan “ **Memantapkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Selaras, Partisipatif, Berdampak dan Inovatif**. “ yang dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 “Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Integratif dan Akuntabel”, dan sasaran startegis 2 “Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi” dengan capaian kinerja 98,02%. capaian kinerja sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu “persentase implementasi sistim informasi pembangunan daerah (SIPD) dengan target tahun 2023 sebesar 90 % dan terealisasi dengan capaian sebesar 98,02% %.
2. Capaian indikator kinerja persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan pada sasaran strategis 1 dan 2 didukung dengan anggaran sebesar Rp.11.414.083.593,- setelah dirasionalisasi, lalu kemudian terealisasi sebesar Rp. 10.590.075.897,- atau sebesar 93% untuk kinerja 3 program yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, (2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta (3) Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Bappeda Provinsi Jambi mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung guna mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan setelah mengalami RASIONALISASI Anggaran adalah sebesar Rp.24.039.011.854,- yang terealisasi sebesar Rp.22.882.830.030,- atau sebesar 95,19% dan realisasi fisiknya 97,66% Artinya terdapat sisa anggaran yang dikembalikan ke kas daerah (KASDA) adalah sebesar Rp.1.156.181.824,-.

Area Perbaikan Yang Sudah Dilakukan

Untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja Bappeda Provinsi Jambi dalam rangka terwujudnya *Kualitas Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Selaras, Partisipatif, Berdampak dan Inovatif*, sudah dilakukan beberapa area perbaikan antara lain :

I. Area Ketatalaksanaan

1. Peta proses bisnis telah dijabarkan dalam bentuk SOP.
2. Prosedur operasional (SOP) telah diterapkan
3. Informasi publik terkait kinerja Bappeda telah dapat diakses melalui website, Bappeda, E-Sakip, dan Tiktok Bappeda.
4. Bappeda sudah menggunakan aplikasi E-Srikandi dalam surat menyurat serta Aplikasi e-SKP online.

II. Area Manajemen Perubahan

1. Rencana Kerja telah selaras dengan Roadmap.
2. Rencana Kerja telah di monitoring dan di evaluasi melalui rapat evaluasi dan dilakukan secara tiga bulan sekali.

III. Area Penataan dan Penguatan Organisasi

1. Telah dilakukan review terhadap Anjab dan ABK Lingkup Bappeda Provinsi Jambi.
2. Telah disusun SOTK baru sesuai kebutuhan kinerja organisasi.
3. Telah disusun konsep standar kompetensi teknis jabatan Lingkup Bappeda Provinsi Jambi.
4. Telah disusun database kebutuhan diklat kompetensi bagi pegawai di Lingkup Bappeda Provinsi Jambi

IV. Area Sumber Daya Manusia

1. SKP Tahun 2023 telah dibuat secara berjenjang dan selaras dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
2. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja telah dibuat dan telah dilakukan evaluasi.

3. Telah disusun database kebutuhan diklat kompetensi bagi pegawai di Lingkup Bappeda Provinsi Jambi.

V. Area Kuntabilitas

1. Pimpinan sudah terlibat langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja.
2. Pimpinan sudah memantau pencapaian kinerja secara berkala.
3. Perjanjian Kinerja secara berjenjang dan selaras mulai dari Esselon II, III, IV dan Staf telah dibuat.
4. Indikator Kinerja Individu telah dibuat dan disesuaikan dengan PK dan SKP.
5. Rencana Aksi telah dibuat dan dievaluasi secara berkala.

VI. Area Pengawasan

1. Telah dilakukan *Public campaign* melalui spanduk dan pamlet.
2. Telah dilakukan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dilingkungan Bappeda Provinsi Jambi.
3. Telah disusun Pedoman Penanganan *Whistleblowing* pada Bappeda Provinsi Jambi.

Area Perbaikan yang akan dilakukan pada Tahun 2023

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi ke depan, sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan;
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif.
3. Perlu adanya peningkatan pada sisi penyusunan perencanaan dan pendanaan yang tepat dan efektif demi menghindari sisa anggaran yang terlalu banyak.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

| | |
|---|-------------|
| KOVER | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GRAFIK | vii |
| DAFTAR GAMBAR..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Gambar Organisasi..... | 2 |
| 1.2.1 Dasar Pembentukan Organisasi | 2 |
| 1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi..... | 4 |
| 1.2.3 Struktur Organisasi | 14 |
| 1.3 Cascading Kinerja..... | 15 |
| 1.4 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)..... | 19 |
| 1.5 Aspek Strategis Organisasi | 23 |
| 1.6 Permasalahan Utama (Strategis Issued) Yang Sedang Dihadapi Organisasi | 24 |
| 1.7 Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 | 25 |
| 1.8 Sistematika Penyajian | 26 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | |
| 2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022-2026..... | 28 |
| 2.2 Tujuan dan Sasaran | 29 |
| 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan..... | 31 |
| 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2023 | 32 |
| 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 33 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 36 |
| 3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja..... | 36 |
| 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2023 | 37 |
| 3.3 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023..... | 43 |
| 3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2023..... | 75 |

| | | |
|---------------|----------------------------|-----------|
| BAB IV | PENUTUP | 66 |
| 4.1 | Kesimpulan..... | 66 |
| 4.2 | Tindak Lanjut Kedepan..... | 67 |
| 4.3 | Lampiran – Lampiran | 69 |

Daftar Tabel

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.1 | Jumlah SDM Aparatur BAPPEDA Provinsi Jambi Menurut Eselonning Tahun 2023... | 19 |
| Tabel 1.2 | Jumlah SDM Aparatur Bappeda Provinsi Jambi menurut tingkat pendidikan Tahun 2023. | 20 |
| Tabel 1.3 | Jumlah SDM Aparatur Bappeda Provinsi Jambi menurut pangkat/golongan Tahun 2023.. | 21 |
| Tabel 1.4 | Jumlah SDM Aparatur Bappeda Provinsi Jambi menurut usia & jenis kelamin Tahun 2023.. | 22 |
| Tabel 2.1 | Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi Tahun 2022-2026..... | 30 |
| Tabel 2.2 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Prov. Jambi Tahun 2022 – 2026..... | 30 |
| Tabel 2.3 | Strategi dan arah Kebijakan Bappeda Prov. Jambi Tahun 2022 - 2026..... | 31 |
| Tabel 2.4 | Rencana Kinerja Tahun 2023..... | 33 |
| Tabel 2.5 | Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Provinsi Jambi Tahun 2023..... | 34 |
| Tabel 2.6 | Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2023..... | 35 |
| Tabel 3.1 | Skala Nilai Peringkat Kinerja..... | 36 |
| Tabel 3.2 | Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Tahun 2022-2026 | 39 |
| Tabel 3.3 | Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023..... | 40 |
| Tabel 3.4 | Pencapaian Target Kinerja BAPPEDA Provinsi Jambi Tahun 2022-2026..... | 42 |
| Tabel 3.5 | Target Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2022-2026..... | 43 |
| Tabel 3.6 | Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan..... | 45 |
| Tabel 3.7 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023, Target dan Target Renstra..... | 46 |
| Tabel 38 | Program/kegiatan/subkegiatan penunjang Indikator Sasaran | |

| | | |
|------------|---|----|
| | kesatu..... | 46 |
| Tabel 3.9 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023, Target dan Target Renstra..... | 47 |
| Tabel 3.10 |Program/kegiatan/subkegiatan penunjang Indikator Sasaran kedua..... | 48 |
| Tabel 3.11 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023, Target dan Target Renstra..... | 49 |
| Tabel 3.12 | Program/kegiatan/subkegiatan penunjang Indikator Sasaran ketiga..... | 49 |
| Tabel 3.13 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023, Target dan Target Renstra..... | 51 |
| Tabel 3.14 | Program/kegiatan/subkegiatan penunjang Indikator Sasaran keempat..... | 51 |
| Tabel 3.15 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023, Target dan Target Renstra..... | 53 |
| Tabel 3.16 | Program/kegiatan/subkegiatan penunjang Indikator Sasaran kelima..... | 53 |
| Tabel 3.17 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023, Target dan Target Renstra..... | 55 |
| Tabel 3.18 | Program/kegiatan/subkegiatan penunjang Indikator Sasaran keenam..... | 56 |
| Tabel 3.19 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023, Target dan Target Renstra..... | 57 |
| Tabel 3.20 | Program/kegiatan/subkegiatan penunjang Indikator Sasaran ketujuh..... | 58 |
| Tabel 3.21 | Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Capaian Tahun 2023 pada Sasaran Strategis I..... | 61 |
| Tabel 3.22 | Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2023 Pada Sasaran Strategis 1 Yaitu Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Integratif Dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi..... | 62 |
| Tabel 3.23 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023, Target dan Target Renstra..... | 66 |
| Tabel 3.24 | Program/Kegiatan/Subkegiatan Penunjang Indikator Sasaran Kesatu Pada Sasaran Strategis K-2.. | 67 |
| Tabel 3.25 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023, Target dan Target Renstra..... | 68 |
| Tabel 3.26 | Program/Kegiatan/Subkegiatan Penunjang Indikator Sasaran Kedua Pada Sasaran Strategis Ke2... | 68 |
| Tabel 3.27 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023, Target dan Target..... | 69 |
| Tabel 3.28 | Program/Kegiatan/Subkegiatan Penunjang Indikator Sasaran Ketiga Pada Sasaran Strategis Ke2.... | 70 |

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 3.29 | Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Capaian Tahun 2023 pada Sasaran Strategis II..... | 72 |
| Tabel 3.30 | Realiasi Penggunaan Anggaran 2023 yang dialokasikan untuk membiayai Program/kegiatan dalam Pencapaian Sasaran Bappeda Provinsi Jambi..... | 75 |

Daftar Grafik

| | | |
|------------|--|----|
| Grafik 1.1 | Grafik perbandingan keadaan pegawai Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023 dengan sebelumnya..... | 19 |
| Grafik 3.1 | Komposisi Belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023..... | 75 |

Daftar Gambar

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(Bappeda) Prov. Jambi..... | 15 |
| Gambar 1.2 Cascading Kinerja..... | 16 |
| Gambar 1.3 Pohon Kinerja 1 BAPPEDA..... | 17 |
| Gambar 1.4 Pohon Kinerja 2 BAPPEDA..... | 18 |
| Gambar 3.1 Konsultasi Publik dan Musrenbang Tahun 2023..... | 52 |
| Gambar 3.2 Tim Ahli Gubernur (T.A.G) Bersama Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2023..... | 54 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menuju Reformasi Birokrasi sebagai salah satu tuntutan masyarakat, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Atas dasar tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan menjalankan fungsi untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah melalui sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan serta memperkuat percepatan pencapaian target pembangunan daerah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran dalam bentuk Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja dan pembenahan manajemen internal di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1291/KEP.GUB/SETDA.ORG- 3.3/2017 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Pada tahun 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2023; serta dokumen perencanaan internal berupa Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022-2026, Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023. Pencapaian di atas dilakukan melalui peningkatan kualitas, kapasitas dan akuntabilitas kinerja serta keuangan secara konsisten dan berkelanjutan.

1.2. Gambaran Organisasi

1.2.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, menetapkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
- b. Pelaksanaan perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. Pelaksanaan perencanaan perekonomian dan sumber daya alam;
- d. Pelaksanaan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Secara umum menjalankan fungsi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yang pertama adalah ketersediaan dana dan yang kedua adalah kapasitas aparatur perencana yang masih perlu ditingkatkan.

Pihak yang paling berpengaruh terlibat dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup Aparatur Sipil Negara lingkup Bappeda Sedangkan dinamika yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan adalah perubahan kondisi ekonomi wilayah, regional, nasional dan global.

Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan BAPPEDA Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait, dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perencanaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dijelaskan bahwa Bappeda Provinsi Jambi terdiri atas susunan Organisasi sebagai berikut :

A. Susunan Organisasi Badan Terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, Membawahi:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Program; dan
 - c) Subbagian Keuangan;
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Membawahi:
 - a) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b) Subbidang Data dan Informasi; dan
 - c) Subbidang Pengendalian, evaluasi, dan Pelaporan;
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Membawahi:
 - a) Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
 - b) Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II; dan

- c) Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
 - 5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Membawahi:
 - a) Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
 - b) Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II; dan
 - c) Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III;
 - 6. Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan, Membawahi
 - a) Subbidang Insfrastruktur dan Kewilayahan I;
 - b) Subbidang Insfrastruktur dan Kewilayahan II; dan
 - c) Subbidang Insfrastruktur dan Kewilayahan III;
 - 7. UPTD; dan
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- B. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- C. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- D. Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- E. Masing-masing Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka melaksanakan perencanaan dan evaluasi kinerja Badan, administrasi keuangan dan administrasi umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan administrasi dalam melaksanakan urusan perencanaan dan evaluasi kinerja; administrasi keuangan; dan administrasi umum Badan;

2. pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan administrasi perencanaan dan evaluasi kinerja Badan, administrasi keuangan dan administrasi umum Badan;
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Sub Bagian**Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:**

1. menghimpun dan menyiapkan kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan;
2. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. menyusun dan mengusulkan rencana kebutuhan pegawai;
4. mengelola administrasi kepegawaian;
5. melaksanakan penatausahaan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
6. melaksanakan pengadaan, pencatatan, pendistribusian dan pemeliharaan barang inventaris; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian program mempunyai tugas:

1. melaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
2. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan Badan dalam dokumen perencanaan;
3. melaksanakan penyusunan dokumen evaluasi Badan;
4. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Badan;
5. melaksanakan evaluasi kinerja Badan, menghimpun dan menyusun kebijakan teknis perencanaan Badan; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

1. melaksanakan penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
2. melaksanakan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
3. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;
4. melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;

5. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
6. melaksanakan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah, koordinasi perencanaan pendanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. pelaksanaan pengintegrasian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan rencana Badan dan rencana pembangunan lainnya;
3. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
4. pelaksanaan koordinasi perencanaan pendanaan dan penyusunan pagu indikatif pembangunan daerah serta sinkronisasi dan analisa kebijakan penganggaran;
5. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan

- pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan forum Badan/lintas Badan;
 - c. melaksanakan pengintegrasian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan rencana Badan dan rencana pembangunan lainnya;
 - d. melaksanakan koordinasi perencanaan pendanaan dan penyusunan pagu indikatif pembangunan daerah;
 - e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penganggaran di daerah;
 - f. melaksanakan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- b. melaksanakan identifikasi permasalahan pembangunan daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
- b. melaksanakan monitoring program dan kegiatan pembangunan daerah;
- c. melaksanakan evaluasi capaian program/kegiatan terkait standar pelayanan minimal;
- d. melaksanakan evaluasi capaian program/kegiatan pembangunan daerah;
- e. melaksanakan penyusunan pelaporan capaian pembangunan daerah;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Badan dalam pelaksanaan fasilitasi dan monitoring evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pemerintahan;

- b. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pemerintahan;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pemerintahan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pembangunan manusia;
- b. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pembangunan manusia;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pembangunan manusia; dan

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang kesejahteraan masyarakat;
- b. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang kesejahteraan masyarakat;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang kesejahteraan masyarakat; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Badan dalam dalam pelaksanaan fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan perekonomian dan sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam, Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang perekonomian;
- b. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang perekonomian;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang perekonomian; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang ekonomi kreatif;
- b. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang ekonomi kreatif; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang sumber daya alam;

- b. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang sumber daya alam;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang sumber daya alam; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan infrastruktur dan kewilayahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan I mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang sumber daya air dan lingkungan hidup;
- b. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang sumber daya air dan lingkungan hidup;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang sumber daya air dan lingkungan hidup; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan II mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
- b. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;

- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan III mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan;
- b. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- c. Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat

administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

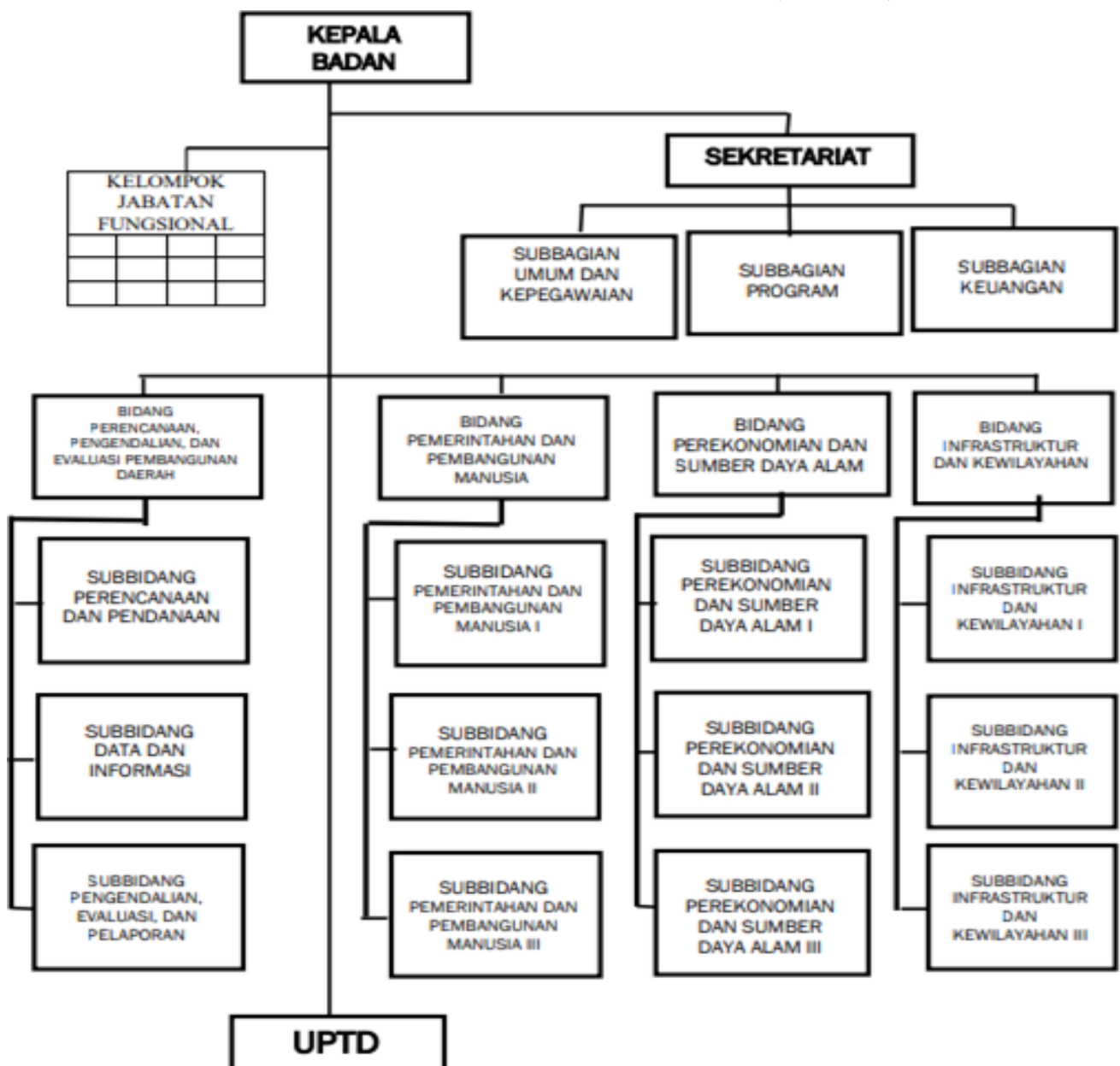
- d. Kebutuhan Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- e. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3 Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang didetailkan dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi



Sumber : PERGUB Nomor 46 Tahun 2020.

1.3 Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jambi, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Jambi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

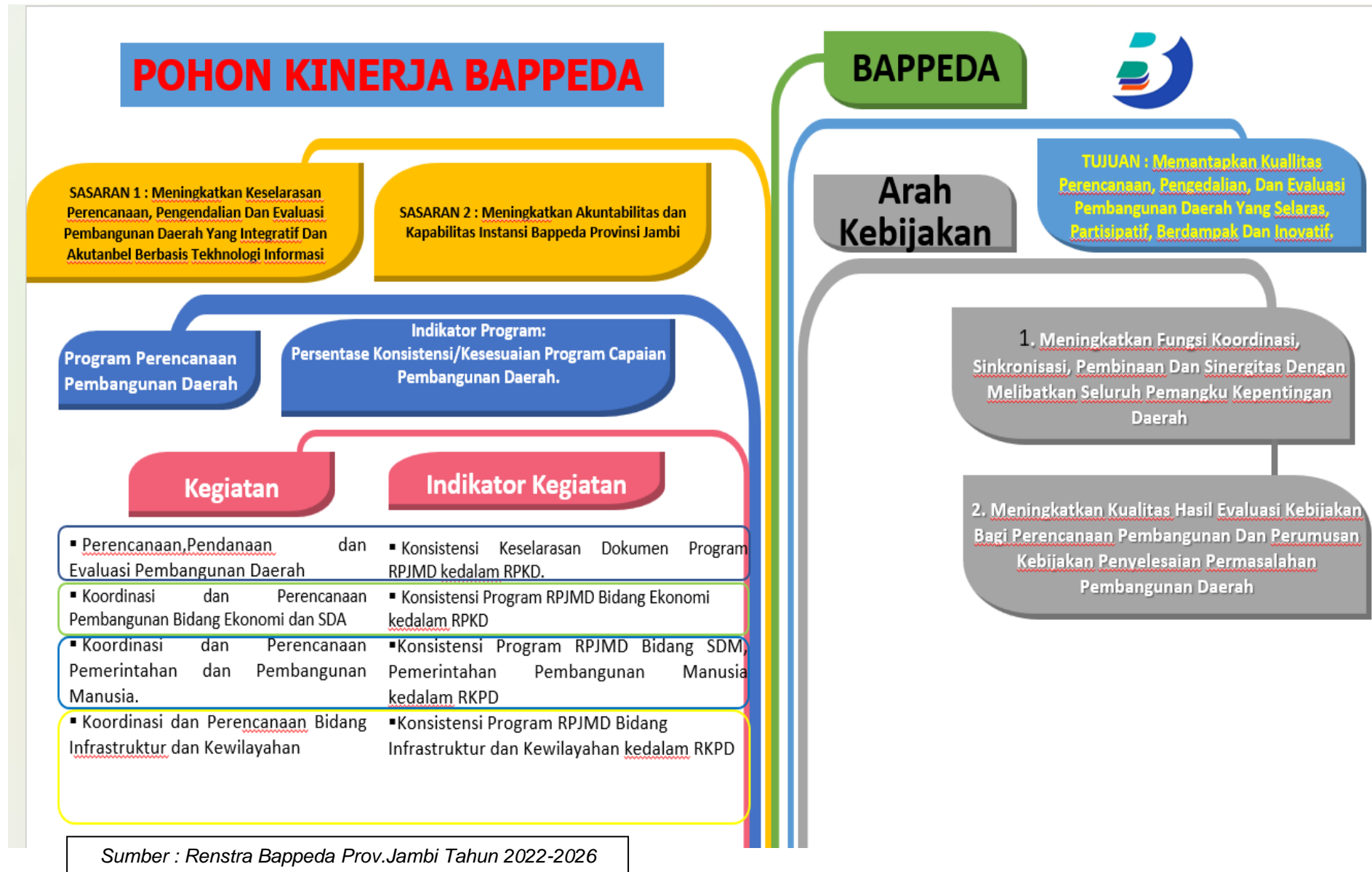
Jambi tahun 2022-2026. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dibentuk dengan skema kinerja yang digambarkan melalui *cascading* sebagai berikut :

Gambar 1.2 Cascading Kinerja

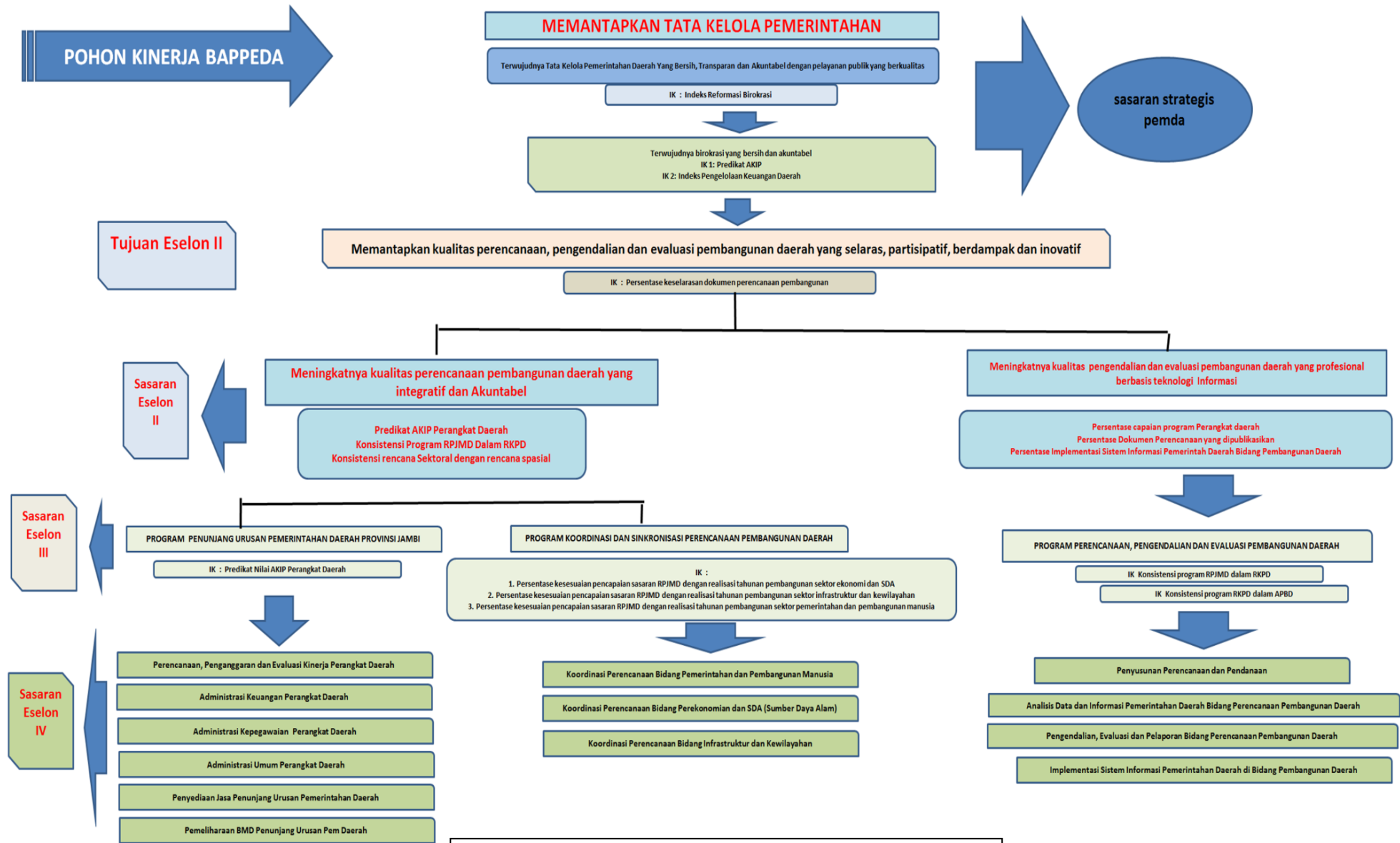


Sumber : Renstra Bappeda Bappeda Prov. Jambi Tahun 2022 - 2026

Gambar 1.3 Pohon Kinerja 1 Bappeda :



Gambar 1.4 Pohon Kinerja 2 Bappeda :



Sumber : Renstra Bappeda Prov.Jambi Tahun 2022-2026

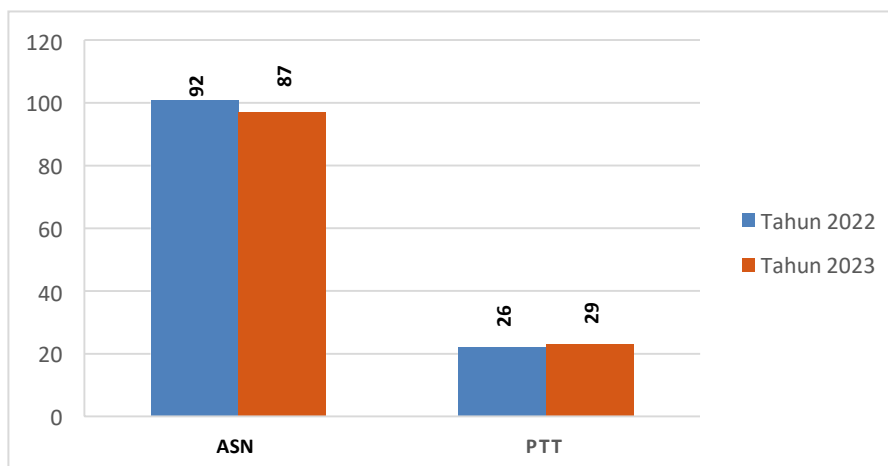
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

1.4 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)

Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi guna untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 46 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, maka diperlukan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berkualitas. Kondisi Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Jambi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebanyak 118 orang dengan rincian Aparatur Sipil Negara sebanyak 92 orang dan Pegawai Tidak Tetap sebanyak 26 orang. Secara kelembagaan terdapat 21 pejabat struktural, 15 pejabat fungsional tertentu, dan yang lain adalah pejabat fungsional umum. Berikut perbandingan keadaan pegawai Bappeda Provinsi Jambi dengan tahun sebelumnya :

Gambar 1.1

Grafik Perbandingan Keadaan Pegawai Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya



Sumber : Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023.

Dari grafik diatas, terlihat bahwa adanya penurunan jumlah Aparatur Sipil Negeri dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2022 jumlah Aparatur Sipil Negara sebanyak 97 orang dan pada Tahun 2023 jumlahnya berkurang adalah menjadi 5 orang sehingga berjumlah 87 orang serta adanya penambahan jumlah Pegawai Tidak Tetap dari tahun sebelumnya, yang jumlah awalnya 26 orang bertambah menjadi 29 orang. Profil Kepegawaian Bappedaa Provinsi Jambi Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1

Jumlah SDM Aparatur Bappeda Provinsi Jambi Menurut Eselonning Tahun 2023

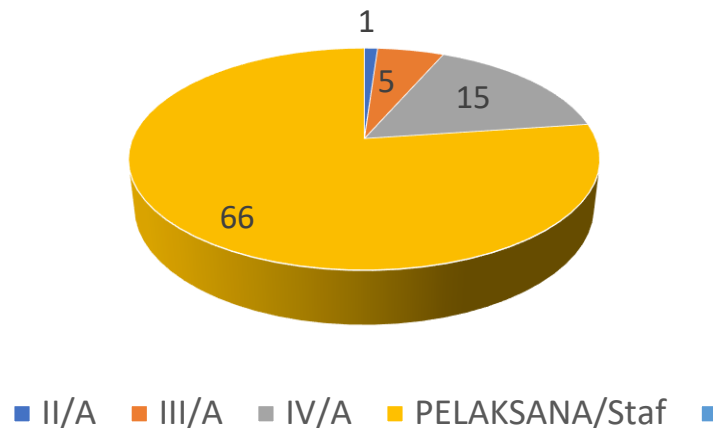
| N O | ESELON | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----|--------|--------|------------------------------|
| 1 | II/A | 1 | Kepala Badan |
| 2 | III/A | 5 | Sekretaris dan Kepala Bidang |

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

| | | | |
|---------------|----------------|-----------|----------|
| 3 | IV/A | 15 | Kasubbag |
| 4 | PELAKSANA/Staf | 66 | - |
| Jumlah | | 87 | - |

Sumber : Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023.

JUMLAH SDM ASN BEPPEDA



Sumber : Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023.

Dari data diatas, terlihat bahwa jabatan eselon pelaksana paling banyak terisi dibandingkan dengan jabatan eselon lainnya yaitu sebanyak 71 orang. Untuk eselon IV/A ada kekosongan jabatan oleh karena yang bersangkutan purna tugas (pensiun) yaitu Sub Bagian Keuangan, yang saat ini dijabat seorang Pelaksana Tugas (Plt).

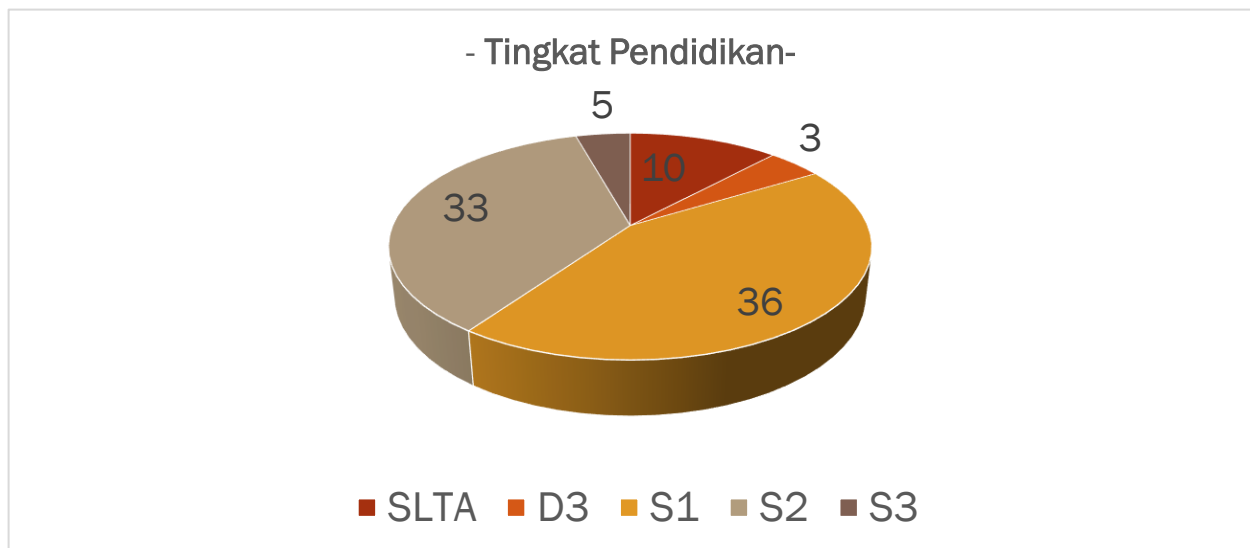
Untuk tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Jumlah SDM Aparatur Bappeda Provinsi Jambi Menurut Tingkat Pendidikan

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | | | | | | | KET |
|---------------|--------------------|------|------|-----|----|----|----|-----|
| | SD | SLTP | SLTA | D 3 | S1 | S2 | S3 | |
| 1 | - | - | 10 | 5 | 36 | 33 | 3 | |
| JUMLAH | 87 | | | | | | | |

Sumber : Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023



Sumber : Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023.

Dari tabel diatas, terlihat bahwa Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Jambi dengan tingkat Pendidikan SLTA sebanyak 10 orang, D3 sebanyak 5 orang, S1 sebanyak 36 orang, S2 sebanyak 33 orang dan S3 sebanyak 3 orang. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa untuk tingkat Pendidikan terbanyak di Bappeda Provinsi Jambi yaitu tingkat pendidikan S1 sebanyak 36 orang dan untuk tingkat pendidikan paling sedikit yaitu tingkat pendidikan S3 hanya sebanyak 3 orang.

Sedangkan untuk jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Bappeda Provinsi Jambi menurut pangkat/golongan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Jumlah SDM Aparatur Bappeda Provinsi Jambi Menurut Pangkat/Golongan

| NO | STATUS | PANGKAT/GOL | JUMLAH/ORANG |
|---------------|-----------------------------|-------------|--------------|
| 1 | Aparatur Sipil Negara (ASN) | II/a | 0 |
| 2 | Aparatur Sipil Negara (ASN) | II/b | 0 |
| 3 | Aparatur Sipil Negara (ASN) | II/c | 4 |
| 4 | Aparatur Sipil Negara (ASN) | II/d | 2 |
| 5 | Aparatur Sipil Negara (ASN) | III/a | 7 |
| 6 | Aparatur Sipil Negara (ASN) | III/b | 10 |
| 7 | Aparatur Sipil Negara (ASN) | III/c | 10 |
| 8 | Aparatur Sipil Negara (ASN) | III/d | 35 |
| 9 | Aparatur Sipil Negara (ASN) | IV/a | 9 |
| 10 | Aparatur Sipil Negara (ASN) | IV/b | 4 |
| 11 | Aparatur Sipil Negara (ASN) | IV/c | 4 |
| 12 | Aparatur Sipil Negara (ASN) | IV/d | 1 |
| JUMLAH | | | 87 |

Sumber : Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023.

Dari data diatas, pangkat/golongan Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Jambi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

terbanyak pertama yaitu pangkat/golongan IV/a yaitu sebanyak 9 orang dan terbanyak kedua yaitu pangkat/golongan III/d yaitu sebanyak 35 orang, sementara untuk Sumber Daya Manusia yang berpangkat/golongan II/a, II/b, di Bappeda Provinsi Jambi tidak ada. Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023 yaitu sebanyak 87 orang dengan rentang usia dan rincian laki-laki/ perempuan tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah SDM Aparatur Bappeda Provinsi Jambi Menurut Usia dan Jenis Kelamin

| NO | RENTANG USIA | JENIS KELAMIN | | JUMLAH |
|-----------------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| | | LK | PR | |
| 1 | 25-29 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | 30-34 | - | 2 | 2 |
| 3 | 35-39 | 4 | 8 | 12 |
| 4 | 40-44 | 7 | 18 | 25 |
| 5 | 45-49 | 10 | 8 | 18 |
| 6 | 50-54 | 10 | 1 | 11 |
| 7 | 55-keatas | 10 | 2 | 12 |
| Jumlah.. | | 42 | 43 | 87 |

Sumber : Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023.

Rentang usia Sumber Daya Manusia Aparatur Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023 mayoritas diatas usia 40 Tahun yaitu sebanyak 67 orang dari total 87 orang Sumber Daya Manusia Aparatur Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023 dengan rincian rentang usia 40 - 44 tahun sebanyak 25 orang, 45-49 tahun sebanyak 18 orang, 50-54 tahun sebanyak 11 orang dan usia 55 tahun keatas sebanyak 12 orang. Sedangkan untuk Sumber Daya Manusia yang berusia dibawah 40 tahun yaitu sebanyak 20 orang dengan rincian rentang usia 25-29 tahun sebanyak 6 orang, 30-34 tahun sebanyak 2 orang dan 35-39 tahun sebanyak 12 orang.

1.5 Aspek Strategis Organisasi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Perangkat Daerah utama di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan proses perencanaan pembangunan, dalam rangka menjamin terciptanya pembangunan yang efektif, efisien untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai badan yang mengkaji berbagai program dan kegiatan strategi dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, untuk kemudian dirumuskan dalam suatu kebijakan pembangunan, telah menempatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Perangkat Daerah yang strategis dalam lingkungan

pemerintahan.

Selanjutnya komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi untuk menghadirkan kinerja institusi yang inklusif, transparan dan akuntabel, diharapkan dapat menularkan karakteristik serupa dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi, seiring dengan peran sentralnya dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi memiliki potensi strategis, antara lain :

1. Memperkuat peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan yang memastikan :
 - a. Proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas;
 - b. Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial;
 - c. Sinergitas dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan terjaga; dan
 - d. Kualitas Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah berjalan maksimal.
2. Dalam konteks pengembangan informasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada stakeholder. Sistem informasi yang telah dibangun antara lain Sistem Informasi Perencanaan, Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah, dan Sistem Database Perencanaan.
3. Ketersediaan SDM Perencana yang cukup memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan rencana pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis dan kredibel.

1. 6 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Yang Sedang Dihadapi Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi sebagai badan pelaksana urusan perencanaan perlu melakukan akselerasi dan menyusun strategi terkait dengan kinerja aparaturnya, kedisiplinan serta ketaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga dapat menjawab tuntutan visi dan misi pembangunan daerah secara nyata dan profesional.

Sebagaimana diberlakukannya peraturan perundangan-undangan yang baru terkait dengan implementasi Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan mengakibatkan Pemerintah Daerah dan Bappeda khususnya sebagai penyelenggara urusan penunjang perencanaan harus menyesuaikan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang baru untuk perencanaan berikutnya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain :

1. Proses Tahapan Perencanaan Belum Optimal :
 - a. Pengendalian terhadap tindak lanjut hasil pelaksanaan MUSRENBANG belum optimal.
 - b. Pengendalian terhadap pelaksanaan Forum OPD belum optimal.
2. Dokumen perencanaan pembangunan belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah:
 - a. Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal.
 - b. Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum optimal didasarkan pada skala prioritas pembangunan.
 - c. Perumusan tolok ukur kinerja belum sepenuhnya mendukung capaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan.
 - d. Perencanaan dan penganggaran pada dokumen perencanaan belum sepenuhnya berdasarkan analisa kebutuhan.
3. Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal:
 - a. Evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan belum optimal.
 - b. Ketersediaan hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah belum optimal.
 - c. Dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah belum optimal.
 - d. Pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas daerah.

1.7 Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut melalui perbaikan kinerja selama Tahun 2023 sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

| No. | Saran/Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|-----|---|--|
| 1 | Menyajikan/melampirkan data/kertas kerja perhitungan capaian kinerja. | Sudah buat lampiran dengan dibuktikan surat keterangan Eselon II dan Eselon III. Surat Keterangan Kepala Bappeda Provinsi Jambi Nomor B-000/1/KET/Bapped/I/2024 Tanggal 30 Januari 2024 |
| 2 | Menyusun Perjanjian Kinerja dengan Indikator Kinerja yang SMART Pada level staf. | Sudah dilakukan sesuai dengan arahan yang disampaikan. Sampel Perjanjian Kinerja (PK) Staf dengan indikator kinerja SMART diantaranya: 1. Muhammad Zuhdi, SE 2. Naulia Pitaloka Candra Devi, S.Tr. IP 3. Tesa Rahayu Milianda, S. Tr. IP 4. Fadia Fara Triana Devi, SIP, MM 5. Hasana, S. STP, ME 6. Mutia Yudistira, S. STP, MH 7. Jumiati |
| 3 | Mengoptimalkan penggunaan aplikasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja. | Untuk Tahun 2024 Bappeda Provinsi Jambi sudah menggunakan Aplikasi e-Srikandi dan e-SKP online. Aplikasi yang sudah digunakan dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja diantaranya http://kinerja.bkn.go.id , http://bappeda.jambiprov.go.id , http://srikandi.arsip.go.id |

Sumber : Laporan Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja dari Inspektorat Prov.Jambi Tahun 2022.

1.8 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 berpedoman pada Lampiran V Peraturan Gubernur Jambi No. 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

Pada bab ini disajikan :

- Gambaran Organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tupoksi, struktur organisasi, sumber daya manusia.
- Aspek strategis organisasi
- Permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada BAB ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan : Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
- Realisasi Anggaran
- Pada sub bab ini diuraikan anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- Perjanjian Kinerja Esselon II
- Indikator Kinerja Utama OPD.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2023 diwarnai agenda refocusing atau rasionalisasi anggaran. Hal ini dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan penggunaan anggaran yang berjalan, serta perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Refocusing dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan semua sektor baik Kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2022.

2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022-2026.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang merupakan penjabaran operasional RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2022-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2022-2026. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat 2 menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 111 menyebutkan bahwa penyusunan rancangan awal Renstra

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

1. Pendahuluan;
2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
3. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan sasaran;
5. Strategi dan arah Kebijakan;
6. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
8. Penutup

Sehubungan dengan peraturan tersebut, maka pada Revisi Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2016-2022 pada Bab IV hanya memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diturunkan dari Visi dan Misi Gubernur Provinsi Jambi yang dimuat dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2022-2026. Sesuai dengan visi gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jambi tahun 2022-2026 adalah “**VISI Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho ALLAh SWT**”.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan serta selaras dengan tujuan kesatu pada misi kesatu RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2022-2026 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel Dengan Pelayanan Publik Berkualitas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Jambi sebagai berikut :

1) Tujuan Jangka Menengah Bappeda Provinsi Jambi.

Tujuan yang akan dicapai selama periode Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022-2026 adalah “*Memantapkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Selaras, Partisipatif, Berdampak Dan Inovatif*”.

2) Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Jambi.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Bappeda Provinsi Jambi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2022-2026) dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu :

- a. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Integratif Dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi.
- b. Meningkatnya Akutanbilitas Dan Kapabilitas Instansi Bappeda Provinsi Jambi

Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Bappeda Provinsi Jambi juga telah menetapkan indikator kinerja masing-masing tujuan dan sasaran strategis tersebut seperti digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022-2026

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN |
|--|--|--|---|
| Memantapkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang selaras, partisipatif, berdampak dan inovatif | Indeks Reformasi Birokrasi Perencanaan | 1. Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang integratif dan Akutanbel berbasis teknologi informasi | Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RPJMD |
| | | | Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD |
| | | | Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah |
| | | | Persentase Konsistensi Program RPJMD Dalam RKPD |
| | | | Persentase Keselarasan Rencana Tahunan dengan hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya |
| | | | Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral dengan rencana spasial |
| | | | Persentase Keterisian data dan Rencana dalam SIPD |
| | | 2. Meningkatnya akutanbilitas dan kapabilitas instansi Bappeda Provinsi Jambi | Predikat AKIP Perangkat Daerah |
| | | | Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dipublikasikan dan tepat waktu |
| | | | Persentase Peningkatan Fungsional Tertentu Pada Perangkat Daerah |

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022-2026

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

Tabel. 2.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022-2026

| No. | Indikator Kinerja Daerah | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun ke 2022 | Target Kinerja Sasaran | | | | | | Kondisi Akhir Periode RPJMD |
|-----|--|---|------------------------|------|------|------|------|------|-----------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Keselaran Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Integratif dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi | 85% | 85 % | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| 2 | Akutanbilitas dan Kapabilitas Instansi Bappeda Provinsi Jambi | 85% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022-2026

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022-2026

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|--|---|
| Memantapkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Selaras, Partisipatif, Berdampak dan Inovatif. | Meningkatkan Keselarasan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Integratif dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi | Peningkatan Kualitas Rencana Pembangunan Daerah Dengan Menyelenggarakan Forum Musrenbangda, Forum SKPD, FGD dan Konsultasi Publik Yang Menjadi Sarana Penyeragaman Rencana Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Daerah | Meningkatkan Fungsi Koordinasi, Sinkronisasi, Pembinaan dan Sinergitas Dengan Melibatkan Seluruh Pemangku Kepentingan Daerah. |
| | Meningkatkan Akutanbilitas dan Kapabilitas Instansi Bappeda Provinsi Jambi. | Peningkatan Kualitas Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dengan Melaksanakan Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan serta <i>Review</i> Terhadap Dokumen Perencanaan yang Telah Ditetapkan dalam RPJMD. | Meningkatkan Kualitas Hasil Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan dan Perumusan Kebijakan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Daerah |

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022-2026.

Berdasarkan data diatas, Bappeda Provinsi Jambi menyusun strategi dan arah kebijakan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Strategi Bappeda Provinsi Jambi berfokus pada peningkatan kualitas rencana pembangunan daerah dan peningkatan kualitas evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan. Sedangkan arah kebijakan Bappeda Provinsi Jambi berfokus pada peningkatan fungsi koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan sinergitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah.

2.4. Rencana Kinerja Tahun 2023

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan maka perlu ditetapkan strategi pencapaian yang akan dilaksanakan. Tahun 2023, berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, Bappeda Provinsi Jambi menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022-2026 yaitu sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui sinergitas perencanaan antar sektor dan antar tingkatan pemerintahan;
- 2) Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan daerah antar sektor dan antar tingkatan pemerintahan serta dengan stakeholder lainnya;
- 3) Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Mengintegrasikan aspek Ruang dan Wilayah dalam perencanaan pembangunan berpedoman pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi tahun 2013-2033;
- 5) Meningkatkan kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam perencanaan pembangunan;
- 6) Mengoptimalkan dokumen evaluasi pembangunan daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah;
- 7) Meningkatkan profesionalisme aparatur Bappeda melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan sarana dan prasarana.
- 8) Mengoperasionalkan peran Bappeda sebagai wali data tingkat provinsi dalam mendukung kebijakan *One Maps Policy*.
- 9) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
- 10) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- 11) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
- 12) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- 13) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

- 14) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- 15) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Penetapan rencana kinerja untuk tahun 2023 berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis 2022-2026 seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4.
Rencana Kinerja Tahun 2023

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET 2023 |
|--|--|--|---|--------|-------------|
| Memantapkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang selaras, partisipatif, berdampak dan inovatif | Indeks Reformasi Birokrasi Perencanaan | 1. Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang integratif dan Akutanbel berbasis teknologi informasi | | | B |
| | | | Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RPJMD | % | 98% |
| | | | Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD | % | 96% |
| | | | persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah | % | 95% |
| | | | Persentase Konsistensi Program RPJMD Dalam RKPD | % | 100% |
| | | | Persentase Keselarasan Rencana Tahunan dengan hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya | % | 100% |
| | | | Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral dengan rencana spasial | % | 100% |
| | | | Presentase Keterisian data dan Rencana dalam SIPD | % | 75% |
| | | 2. Meningkatnya akutanbilitas dan kapabilitas instansi Bappeda Provinsi Jambi | Predikat AKIP Perangkat Daerah | % | B |
| | | | Presentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dipublikasikan dan tepat waktu | % | 100% |
| | | | Presentase Peningkatan Fungsional Tertentu Pada Perangkat Daerah | % | 35% |

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022-2026.

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 dilaksanakan merujuk pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Salah satu tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dengan penerima amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai evaluasi kinerja aparatur. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada RENSTRA, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi adalah dapat dilihat pada 2 (dua) tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang integratif dan | Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RPJMD | 98% |
| | | Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD | 96% |

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

| | | | |
|---|--|--|------|
| | Akutanbel berbasis teknologi informasi | Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah | 95% |
| | | Persentase Konsistensi Program RPJMD Dalam RKPD | 100% |
| | | Persentase Keselarasan Rencana Tahunan dengan hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya | 100% |
| | | Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral dengan rencana spasial | 100% |
| | | Presentase Keterisian data dan Rencana dalam SIPD | 75% |
| | | | |
| 2 | Meningkatnya akutanbilitas dan kapabilitas instansi Bappeda Provinsi Jambi | Predikat AKIP Perangkat Daerah | B |
| | | Presentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dipublikasikan dan tepat waktu | 100% |
| | | Presentase Peningkatan Fungsional Tertentun Pada Perangkat Daerah | 35% |

Sumber : Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023.

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2023 tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp. 24.039.011.854,- yang digunakan untuk melaksanakan 3 program dengan 12 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2023

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rupiah) |
|-----------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. | 15.162.005.547,- |
| 2 | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. | 4.381.725.707,- |
| 3 | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. | 4.495.280.600,- |
| JUMLAH... | | 24.039.011.854,- |

Sumber : Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam BAB ini dilaporkan akuntabilitas kinerja meliputi hasil pengukuran capaian indikator kinerja Bappeda Provinsi Jambi, hasil analisis pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Jambi, serta akuntabilitas keuangan Bappeda Provinsi Jambi tahun anggaran 2023.

3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dan sasaran, mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | 91% ≤ 100% | Sangat Tinggi |
| 2. | 76% ≤ 90 % | Tinggi |
| 3. | 66% ≤ 75% | Sedang |
| 4. | 51% ≤ 65% | Rendah |
| 5. | ≤ 55% | Sangat Rendah |

Sumber : Permendagri RI No. 86 Tahun 2017

Sasaran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Mengacu pada telaah Visi, Misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi serta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, maka dengan memperhatikan hasil analisis dan mempertimbangkan isu-isu strategis penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Jambi, selain itu juga sebagai upaya untuk menjawab isu dan permasalahan dalam urusan perencanaan pembangunan daerah serta didasarkan kriteria-kriteria tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada periode jangka menengah, yaitu mendukung pencapaian Misi 1, yaitu **:“Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan”**.
2. Tujuan strategis yang dirumuskan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan;
3. Tujuan strategis yang dirumuskan dapat mengarahkan dalam perumusan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan pencapaian tujuan Perangkat Daerah.

Sedangkan dalam perumusan sasaran strategis didasarkan pada kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Perangkat Daerah dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program serta memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Merupakan ukuran pencapaian dari tujuan Perangkat Daerah yang mencerminkan berfungsinya *outcomes* dari semua program;
2. Dirumuskan dengan mengacu sasaran pembangunan yang terdapat dalam

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

RPJMD sesuai dengan tugas fungsi Perangkat Daerah;

- Memiliki sebab akibat (*causality*) secara logis dengan sasaran pembangunan dalam RPJMD;
- Dirumuskan dengan jelas dan terukur dan dilengkapi dengan indikator dan target kinerja.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022–2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan : “Memantapkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Selaras, Partisipatif, Berdampak Dan Inovatif”.

Indikator Tujuan : “ Indeks Reformasi Birokrasi Bidang Perencanaan”.

Kemudian ada 2 (dua) Sasaran, yaitu :

- Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Integratif Dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi.

Indikator Sasarannya adalah :

- Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RPJMD;
 - Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD;
 - Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RPJMD;
 - Persentase Konsistensi Program RPJMD dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - Persentase Keselarasan Rencana Tahunan dengan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana tahun sebelumnya;
 - Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral dengan Rencana Spasial;
 - Persentase Keterisian Data dan Rencana dalam Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
- Meningkatnya Akuntabilitas dan Kapasitas Instansi Bappeda Provinsi Jambi.**

Indikator Sasarannya adalah :

- Predikat AKIP Perangkat Daerah;
- Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dipublikasikan dan Tepat Waktu;

c. Persentase Peningkatan Fungsional Tertentu pada Perangkat Daerah.

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran serta indikatornya Masing-masing Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022–2026 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2023

Tabel 3.2.
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Tahun 2022-2026.

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE | | | | |
|----|--|--|--|---|--------|---|------|------|------|------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Memantapkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang selaras, partisipatif, berdampak dan inovatif | Indeks Reformasi Birokrasi Perencanaan | | | | B | B | BB | BB | BB |
| | | | 1. Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang integratif dan Akutanbel berbasis teknologi informasi | Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RPJMD | % | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| | | | | Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD | % | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
| | | | | persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| | | | | Persentase Konsistensi Program RPJMD Dalam RKPD | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Persentase Keselarasan Rencana Tahunan dengan hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral dengan rencana spasial | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Presentase Keterisian data dan Rencana dalam SIPD | % | 70% | 75% | 78% | 80% | 85% |
| | | | 2. Meningkatnya akutanbilas dan kapabilitas instansi Bappeda Provinsi Jambi | Predikat AKIP Perangkat Daerah | % | B | B | BB | BB | A |
| | | | | Presentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dipublikasikan dan tepat waktu | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Presentase Peningkatan Fungsional Tertentu Pada Perangkat Daerah | % | 30% | 35% | 40% | 40% | 45% |

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022-2026

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

Hasil pengukuran tingkat capaian kinerja, sasaran strategis, indikator kinerja, yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dapat diilustrasikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PREDIKAT |
|-------------------|--|---|--------|-----------|---------|---------------|
| 1 | 1. Meningkatkan keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang integratif dan Akutanbel berbasis teknologi informasi | Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RPJMD | 98% | 98,95% | 100% | Sangat Tinggi |
| | | Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD | 96% | 99,27% | 100% | Sangat Tinggi |
| | | persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah | 95% | 99,78% | 100% | Sangat Tinggi |
| | | Persentase Konsistensi Program RPJMD Dalam RKPD | 100% | 100% | 100% | Sangat Tinggi |
| | | Persentase Keselarasan Rencana Tahunan dengan hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya | 100% | 100% | 100% | Sangat Tinggi |
| | | Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral dengan rencana spasial | 100% | 100% | 100% | Sangat Tinggi |
| | | Presentase Keterisian data dan Rencana dalam SIPD | 75% | 91,54% | 100% | Sangat Tinggi |
| 2 | 2. Meningkatkan akutanbilitas dan kapabilitas instansi Bappeda Provinsi Jambi | Predikat AKIP Perangkat Daerah | B | A | 80,90% | Sangat Tinggi |
| | | Presentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dipublikasikan dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | Sangat Tinggi |
| | | Presentase Peningkatan Fungsional Tertentun Pada Perangkat Daerah | 35% | 20,97% | 69,9% | Tinggi |
| RATA-RATA CAPAIAN | | | 100 | | | |

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022-2026

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian dari indikator Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang integratif dan Akutanbel berbasis teknologi informasi) adalah dengan predikat sangat baik (100%), dan sasaran strategis 2 (Meningkatnya akutanbilitas dan kapabilitas instansi Bappeda Provinsi Jambi) dengan predikat sangat baik (100%). Dengan demikian pencapaian indikator sasaran strategis Bappeda secara rata-rata adalah sangat baik (100%).

Perbandingan target capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi selama periode Tahun 2022–2026 seperti yang digambarkan pada tabel 3.4 dibawah ini menunjukkan bahwa hasil yang baik yaitu dengan capaian masing-masing indikator adalah 100%.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

Tabel 3.4
Pencapaian Target Kinerja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022 - 2026

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Renstra | | | | | |
|----|---|---|--------|----------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Integratif Dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi | Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RPJMD | % | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| | | Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD | % | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
| | | persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| | | Persentase Konsistensi Program RPJMD Dalam RKPD | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Keselarasan Rencana Tahunan dengan hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral dengan rencana spasial | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Presentase Keterisian data dan Rencana dalam SIPD | % | 70% | 70% | 75% | 78% | 80% | 85% |
| 2 | Meningkatnya Akutanbilitas Dan Kapabilitas Instansi Bappeda Provinsi Jambi | Predikat AKIP Perangkat Daerah | Nilai | B | B | B | BB | BB | A |
| | | Presentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dipublikasikan dan tepat waktu | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Presentase Peningkatan Fungsional Tertentun Pada Perangkat Daerah | % | 30% | 30% | 35% | 40% | 40% | 45% |

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022-2026

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

3.3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Guna melihat realisasi dan capaian kinerja terkait dengan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Jambi Periode Renstra 2022-2026, yaitu :

Tujuan :

“Memantapkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Selaras, Partisipatif, Berdampak Dan Inovatif “

Guna mewujudkan misi 1 RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2022-2026 yaitu Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT, Bappeda Provinsi Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan menetapkan tujuan yaitu ***memantapkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang selaras, partisipatif, berdampak dan inovatif***. Melalui tujuan tersebut diharapkan tersedianya dokumen perencanaan daerah yang valid sehingga dapat memberikan arah dan pedoman dalam pengelolaan daerah yang memberikan dampak terhadap stabilitas makro ekonomi. Pencapaian tujuan pertama ini dapat dilihat dari target realisasi indikatornya sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Target Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2022-2026

| No | Indikator Kinerja Tujuan | Target Realisasi | | | | | |
|----|---|------------------|------|------|------|------|-------|
| | | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Persentase Konsistensi Program RPJMD Dalam RKPD dengan RPJMD. | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % |

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022-2026

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

Dilihat dari target realisasi indikator kinerja diatas dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas telah terpenuhi. Hal ini diketahui dari capaian indikator kinerja tujuan yaitu Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Persentase Konsistensi Program RPJMD Dalam RKPD dengan RPJMD dengan realisasi 100%.

Untuk mencapai tujuan terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas telah ditetapkan 2 sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut :

| | |
|---------------------|---|
| SASARAN STRATEGIS 1 | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Integratif Dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi |
|---------------------|---|

Salah satu keberhasilan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi sesuai yang diamanahkan oleh Peraturan Gubernur Jambi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, menetapkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyusun perencanaan adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, transparan, bisa dipertanggungjawabkan, maka sasaran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi salah satunya adalah bagaimana meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang diukur melalui indikator **Persentase keselarasan dokumen perencanaan** pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Persentase Konsistensi Program RPJMD Dalam RKPD dengan RPJMD, dengan target setiap tahunnya adalah 100%. Target ini

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

ditetapkan atas dasar bahwa dokumen perencanaan secara berjenjang harus terjaga kekonsistennannya agar pelaksanaan pembangunan yang direncanakan benar-benar dapat memecahkan permasalahan yang ada di Provinsi Jambi. Kesesuaian antar dokumen perencanaan ini dilihat dari :

- a) Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra.
- b) Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja.
- c) Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD.
- d) Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Rumusan Indikator dan Formulasi Penghitungan

| No | Sasaran | Indikator | Formula Penghitungan |
|----|---|---|--|
| 1. | Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan | <p>Persentase kesesuaian antar dokumen.</p> <p>Kesesuaian ini dilihat dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra. b. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja. c. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD. d. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">=</div> <div> <p>Total Persentase Kesesuaian Sasaran dan Indikator Sasaran antara berbagai dokumen (point a-d)</p> <hr/> <p>4</p> </div> </div> |

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022-2026

Maka, untuk itu *Pencapaian Kinerja Realisasi Indikator Sasaran* tahun 2023 sebagaimana yang tertuang dalam **Renstra** Bappeda Tahun 2022-2026 yang diselaraskan dengan indikator sasaran pada **RPJMD** Provinsi Jambi Tahun 2022-2026, dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

1. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Dengan RPJMD.

Capaian sasaran strategis kesatu Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Integratif dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi yang dikuatkan pada indikator sasaran yang **pertama** Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Dengan RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023, Target dan Target Renstra.

| Indikator Sasaran | Realisasi T.2022 | Target T. 2023 | Realisasi Kinerja T. 2023 | Capaian Kinerja T.2023 | Target Renstra |
|--|------------------|----------------|---------------------------|------------------------|----------------|
| Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Dengan RPJMD | 98% | 98% | 98,95% | 100% | 98% |

Sumber : Data diolah, Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022-2026.

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Dengan RPJMD, sudah sama dengan target Renstra yaitu sebesar 100% sedangkan target Renstra 98%.

Adapun untuk mendorong realisasi capaian kinerja pada indikator sasaran Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Dengan RPJMD didukung anggaran biaya yang tertera pada program, kegiatan dan subkegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8

Program/kegiatan/subkegiatan penunjang Indikator Sasaran kesatu.

| No | Program / Kegiatan | Jenis Belanja | | | | Anggaran Belanja | Realisasi Jenis Belanja | | | | Realisasi Anggaran Belanja | % Realisasi Keuangan | % Realisasi Fisik | Sisa Anggaran | PERSentase % |
|---|--|-----------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | | | | |
| PROGRAM KOORDINASI DAN SIKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 2.961.215.000 | 0 | 0 | 0 | 2.961.215.000 | 2.930.188.494 | 0 | 0 | 0 | 2.930.188.494 | 98,95 | 100,00 | 31.026.506 | 1,06% |
| 1 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 348.810.000 | 0 | 0 | 0 | 348.810.000 | 348.359.865 | 0 | 0 | 0 | 348.359.865 | 99,87 | 100,00 | 450.135 | 0,13% |
| 2 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang | 679.305.000 | 0 | 0 | 0 | 679.305.000 | 672.633.418 | 0 | 0 | 0 | 676.649.125 | 99,61 | 100,00 | 2.655.875 | 0,39% |
| 3 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan | 1.933.100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.933.100.000 | 1.909.195.211 | 0 | 0 | 0 | 1.909.195.211 | 98,76 | 100,00 | 23.904.789 | 1,25% |

Sumber : Data diolah dari LPPK dan Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa hanya subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang melebihi target Renstra yaitu sebesar 98,95%. Kemudian pada Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.31.026.506,- dari jumlah anggaran yang tersedia.

2. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Dengan RPJMD.

Capaian sasaran strategis kesatu Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Integratif dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi yang dikuatkan pada indikator sasaran yang **kedua** Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Dengan RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023, Target dan Target Renstra.

| Indikator Sasaran | Realisasi T.2022 | Target T. 2023 | Realisasi Kinerja T. 2023 | Capaian Kinerja T.2023 | Target Renstra |
|---|------------------|----------------|---------------------------|------------------------|----------------|
| Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Dengan RPJMD | 96,5% | 96% | 99,27% | 100% | 96% |

Sumber : Data diolah, Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022-2026.

Pada tabel diatas, dapat disampaikan bahwa realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Dengan RPJMD, hampir mendekati target Renstra yaitu sebesar 100% sedangkan target Renstra 96%. Dalam hal ini untuk mendorong realisasi capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Dengan RPJMD didukung anggaran biaya yang tertera pada program, kegiatan dan subkegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10

Program/kegiatan/subkegiatan penunjang Indikator Sasaran kedua.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

| No | Program / Kegiatan | Jenis Belanja | | | | Anggaran Belanja | Realisasi Jenis Belanja | | | | Realisasi Anggaran Belanja | % Realisasi Keuangan | % Realisasi Fisik | Sisa Anggaran | PERSENTASE % |
|---|--|-----------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | | | | |
| III. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | 565.185.135 | 0 | 0 | 0 | 565.185.135 | 561.060.793 | 0 | 0 | 0 | 561.060.793 | 99,27 | 100,00 | 4.124.342 | 0,74% |
| 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 17.323.059 | 0 | 0 | 0 | 17.323.059 | 17.322.699 | 0 | 0 | 0 | 17.322.699 | 100,00 | 100,00 | 360 | 0,00% |
| 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 35.162.060 | 0 | 0 | 0 | 35.162.060 | 34.436.142 | 0 | 0 | 0 | 34.436.142 | 97,94 | 100,00 | 725.918 | 2,11% |
| 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 4.449.356 | 0 | 0 | 0 | 4.449.356 | 4.393.344 | 0 | 0 | 0 | 4.393.344 | 98,74 | 100,00 | 56.012 | 1,27% |
| 4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 80.900.000 | 0 | 0 | 0 | 80.900.000 | 80.900.000 | 0 | 0 | 0 | 80.900.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00% |
| 5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 137.320.000 | 0 | 0 | 0 | 137.320.000 | 137.320.000 | 0 | 0 | 0 | 137.320.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00% |
| 6 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 86.216.990 | 0 | 0 | 0 | 86.216.990 | 83.799.388 | 0 | 0 | 0 | 83.799.388 | 97,20 | 100,00 | 2.417.602 | 2,88% |
| 7 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 6.003.770 | 0 | 0 | 0 | 6.003.770 | 5.329.320 | 0 | 0 | 0 | 5.329.320 | 88,77 | 100,00 | 674.450 | 12,66% |
| 8 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 197.809.900 | 0 | 0 | 0 | 197.809.900 | 197.559.900 | 0 | 0 | 0 | 197.559.900 | 99,87 | 100,00 | 250.000 | 0,13% |

Sumber : Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023.

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa ada dua subkegiatan yaitu Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan persentase capaian kinerja melebihi target Renstra yaitu sebesar 99,27% dan kedua adalah subkegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang melebihi target Renstra yaitu sebesar 97,94%. dan untuk efisiensi anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.124.342,- dari jumlah anggaran yang tersedia.

3. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan.

Untuk capaian sasaran strategis kesatu Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Integratif dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi yang dikuatkan pada indikator sasaran yang **ketiga** yaitu Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

Tabel 3.11

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023, Target dan Target Renstra.

| Indikator Sasaran | Realisasi T.2022 | Target T. 2023 | Realisasi Kinerja T. 2023 | Capaian Kinerja T.2023 | Target Renstra |
|---|------------------|----------------|---------------------------|------------------------|----------------|
| Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 98,30% | 95% | 99,78% | 100% | 95% |

Sumber : Data diolah, Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, sudah melebihi target Renstra yaitu sebesar 99,78% sedangkan target Renstra hanya sebesar 95%.

Untuk mendorong realisasi capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dapat didukung dengan anggaran biaya yang tertera pada tabel program, kegiatan dan subkegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12 Program/kegiatan/subkegiatan penunjang Indikator Sasaran ketiga.

| No | Program / Kegiatan | Jenis Belanja | | | | Anggaran Belanja | Realisasi Jenis Belanja | | | | Realisasi Anggaran Belanja | Realisasi Keuangan | % Realisasi Fisik | Sisa Anggaran | PRESENTASE % |
|---|--|-----------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------------|------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | | | | |
| III. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 559.769.353 | 0 | 0 | 0 | 559.769.353 | 558.515.599 | 0 | 0 | 0 | 558.515.599 | 99,78 | 100,00 | 1.253.754 | 0,224% |
| 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 27.005.002 | 0 | 0 | 0 | 27.005.002 | 26.875.282 | 0 | 0 | 0 | 26.875.282 | 99,52 | 100,00 | 129.720 | 0,483% |
| 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 11.203.941 | 0 | 0 | 0 | 11.203.941 | 11.197.940 | 0 | 0 | 0 | 11.197.940 | 99,95 | 100,00 | 6.001 | 0,054% |
| 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 50.887.951 | 0 | 0 | 0 | 50.887.951 | 50.706.451 | 0 | 0 | 0 | 50.706.451 | 99,64 | 100,00 | 181.500 | 0,358% |
| 4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 266.493.348 | 0 | 0 | 0 | 266.493.348 | 266.467.348 | 0 | 0 | 0 | 266.467.348 | 99,99 | 100,00 | 26.000 | 0,010% |
| 5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 25.668.102 | 0 | 0 | 0 | 25.668.102 | 25.536.904 | 0 | 0 | 0 | 25.536.904 | 99,49 | 100,00 | 131.198 | 0,514% |
| 6 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 7.984.351 | 0 | 0 | 0 | 7.984.351 | 7.984.351 | 0 | 0 | 0 | 7.984.351 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,000% |
| 7 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 36.721.051 | 0 | 0 | 0 | 36.721.051 | 36.097.051 | 0 | 0 | 0 | 36.097.051 | 98,30 | 100,00 | 624.000 | 1,729% |
| 8 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | 133.805.607 | 0 | 0 | 0 | 133.805.607 | 133.650.272 | 0 | 0 | 0 | 133.650.272 | 99,88 | 100,00 | 155.335 | 0,116% |

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

Sumber : Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023.

Pada tabel di atas dapat disampaikan bahwa subkegiatan melebihi target Renstra yaitu sebesar 95%, dan untuk kegiatan ini efisiensi anggaran yang didapat adalah sebesar Rp. 1.253.754,- dari jumlah anggaran yang tersedia pada tahun 2023.

4. Persentase Konsistensi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada capaian sasaran strategis kesatu Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Integratif dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi yang dikuatkan pada indikator sasaran yang **keempat** yaitu Persentase Konsistensi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023, Target dan Target Renstra.

| Indikator Sasaran | Realisasi T.2022 | Target T. 2023 | Realisasi Kinerja T. 2023 | Capaian Kinerja T.2023 | Target Renstra |
|---|------------------|----------------|---------------------------|------------------------|----------------|
| Persentase Konsistensi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber : Data diolah, Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022-2026.

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran Persentase Konsistensi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), TIDAK memenuhi target Renstra yaitu hanya sebesar 100% sedangkan target Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022-2026 sebesar 100%. Untuk mendorong realisasi capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase Konsistensi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat didukung dengan anggaran biaya yang tertera pada tabel program PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH,

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

kegiatan dan subkegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14

Program/kegiatan/subkegiatan penunjang Indikator Sasaran keempat.

| No | Program / Kegiatan | Jenis Belanja | | | | Anggaran Belanja | Realisasi Jenis Belanja | | | | Realisasi Anggaran Belanja | % Realisasi Keuangan | % Realisasi Fisik | Sisa Anggaran | PRESENT ASE % |
|---|---|-----------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | | | | |
| II. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 2.052.317.806 | 0 | 0 | 0 | 2.052.317.806 | 1.487.182.417 | 0 | 0 | 0 | 1.487.182.417 | 72,46 | 72,64 | 565.135.389 | 38% |
| 1 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | 112.390.306 | 0 | 0 | 0 | 112.390.306 | 108.853.410 | 0 | 0 | 0 | 108.853.410 | 96,85 | 100,00 | 3.536.896 | 3% |
| 2 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 67.944.200 | 0 | 0 | 0 | 67.944.200 | 67.852.736 | 0 | 0 | 0 | 67.852.736 | 99,87 | 100,00 | 91.464 | 0% |
| 3 | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi | 869.799.400 | 0 | 0 | 0 | 869.799.400 | 449.685.079 | 0 | 0 | 0 | 449.685.079 | 51,70 | 51,70 | 420.114.321 | 93% |
| 4 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi | 1.002.183.900 | 0 | 0 | 0 | 1.002.183.900 | 860.791.192 | 0 | 0 | 0 | 860.791.192 | 85,89 | 85,89 | 141.392.708 | 16% |

Sumber : Data diolah, Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa anggaran awal yang tersedia sebesar Rp.2.052.317.806,- lalu dari pagu tersebut sisa anggaran yang menjadi silpa adalah sebesar Rp.565.135.389,- lalu pada subkegiatan yang serapan nya dibawah target adalah subkegiatan pelaksanaan Musrenbang Provinsi hanya terdapat serapan sebesar 51,70%, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, terdiri dari empat (4) subkegiatan yaitu Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah, Pelaksanaan Konsultasi Publik, Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
- b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat 2 Subkegiatan antara lain Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan satu subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

Pada point “a sampai dengan c” diatas yang paling banyak silpa atau sisa anggaran yang tidak terealisasi adalah pada point “a” yaitu Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, pada kegiatan tersebut pagu yang diberikan adalah sebesar Rp.2.708.984.206,- dengan persentase serapan keuangan sebesar 75,04% atau sebesar Rp.2.032.834.540,- lalu silpa yang dikembalikan adalah sebesar Rp.676.149.666,-

Ada beberapa permasalahan yang mendasar yang menjadi alasan kenapa besarnya silpa/pengembalian dana yang dilakukan, dapat di jelaskan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pasal 49 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Kepala Daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan. Lalu Gubernur Jambi sudah mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi dengan Nomor S-3191/Bappeda-2.1//XI/2023 tanggal 14 November 2023 dengan Prihal Penyampaian Rancangan Awal Perubahan-RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Selanjutnya pada pasal (4) disebutkan bahwa pembahasan dan kesepakatan rancangan awal RPJMD paling lambat 10 hari sejak diterima surat yang disampaikan oleh pihak eksekutif kepada pihak legislatif yaitu Ketua DPRD Provinsi Jambi. Namun pada akhir Desember tahun 2023, pihak legislatif yakni DPRD Provinsi Jambi belum juga melakukan pembahasan Rancangan Awal Perubahan-RPJMD dimaksud. Kemudian pada ayat (7) disebutkan bahwa Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pasal ayat (4) tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka Kepala Daerah dapat melanjutkan ke tahapan penyusunan berikutnya. Lalu tahapan berikutnya adalah tahapan Konsultasi Ranwal RPJMD, sebagaimana pada pasal 51, Gubernur mengkonsultasikan Ranwal RPJMD kepada Menteri melalui Dirjen Bina Bangda Kemendagri. Untuk itu, Bappeda Provinsi Jambi juga sudah menyampaikan permohonan konsultasi Ranwal kepada Kemendagri melalui surat Sekda Nomor S-3433/Bappeda-2.1/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023, namun hingga akhir tahun 2023 belum ditindaklanjuti oleh Kemendagri, sehingga tahapan pelaksanaan Musrenbang P-RPJMD tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu dapat

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

disimpulkan bahwa dana yang telah dianggarkan masih belum bisa digunakan dengan mestinya.

2. Kemudian merupakan bentuk efisiensi anggaran, dengan catatan seluruh target output sub kegiatan dapat tercapai. Yang tersisa sebagian besar dari honor narasumber, karena sebagian besar narasumber internal Bappeda, serta format rapat yang lebih banyak dilakukan melalui desk, sehingga ada beberapa nilai rupiah yang dikembalikan.
3. Pada Subkegiatan penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan ini ada penyusunan dan cetak dokumen Perubahan RPJMD, oleh karena masih belum ada kesepakatan dengan DPRD, makanya pentahapan tersebut belum bisa dilanjutkan, oleh karenanya untuk Penyusunan Dokumen Rancangan P-RPJMD belum bisa dilaksanakan hingga akhir tahun 2023, tahap tersebut hanya sampai penyusunan Rancangan Awal P-RPJMD. Makanya kegiatan cetak dokumen tersebut blm bisa dilaksanakan dikarenakan dokumen Perda P-RPJMD belum tersedia.
4. Untuk agenda Musrenbang perubahan RPJMD belum bisa dilaksanakan dikarenakan prosesnya masih tertunda di DPRD, maka jumlah dana untuk subkegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi yang dikembalikan (silpa) adalah sebesar Rp.420.114.321,-



Gambar 3.1 Konsultasi Publik dan Musrenbang Tahun 2023.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2023**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023



Sumber : Dokumen Bappeda bidang PPED Tahun 2023.

5. Persentase Keselarasan Rencana Tahunan Dengan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya.

Pada capaian sasaran strategis kesatu Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Integratif dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi yang dikuatkan pada indikator sasaran yang **kelima** yaitu Persentase Keselarasan Rencana Tahunan Dengan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023, Target dan Target Renstra.

| Indikator Sasaran | Realisasi T.2022 | Target T. 2023 | Realisasi Kinerja T. 2023 | Capaian Kinerja T.2023 | Target Renstra |
|--|------------------|----------------|---------------------------|------------------------|----------------|
| Persentase Keselarasan Rencana Tahunan Dengan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber : Data diolah, Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022-2026.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran Persentase Keselarasan Rencana Tahunan Dengan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya, memenuhi target Renstra yaitu hanya sebesar 100% sedangkan target Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022-2026 sebesar 100%.

Untuk mendorong realisasi capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase Keselarasan Rencana Tahunan Dengan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya, didukung dengan anggaran biaya yang tertera pada tabel program PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, pada 2 kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dan Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta didukung oleh beberapa subkegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16

Program/kegiatan/subkegiatan penunjang Indikator Sasaran kelima.

| No | Program / Kegiatan | Jenis Belanja | | | | Anggaran Belanja | Realisasi Jenis Belanja | | | | Realisasi Anggaran Belanja | % Realisasi Keuangan | % Realisasi Fisik | Sisa Anggaran | PRESENT ASE % |
|---|--|-----------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | | | | |
| II. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 656.666.400 | 0 | 0 | 0 | 656.666.400 | 545.652.123 | 0 | 0 | 0 | 545.652.123 | 83,09 | 100,00 | 111.014.277 | 20% |
| 1 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | 656.666.400 | 0 | 0 | 0 | 656.666.400 | 545.652.123 | 0 | 0 | 0 | 545.652.123 | 83,09 | 100,00 | 111.014.277 | 20% |
| 3. | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.374.838.200 | 0 | 0 | 0 | 1.374.838.200 | 1.332.496.788 | 0 | 0 | 0 | 1.332.496.788 | 96,92 | 0,00 | 42.341.412 | 3% |
| 1 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 1.356.674.200 | 0 | 0 | 0 | 1.356.674.200 | 1.314.332.788 | 0 | 0 | 0 | 1.314.332.788 | 96,88 | 100,00 | 42.341.412 | 3% |
| 2 | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 18.164.000 | 0 | 0 | 0 | 18.164.000 | 18.164.000 | 0 | 0 | 0 | 18.164.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0% |

Sumber : Data diolah dan Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023.

Pada tabel di atas dapat disampaikan bahwa untuk satu program terdapat dua kegiatan dan satu subkegiatan, kemudian anggaran biaya untuk tiga subkegiatan tersebut adalah sebesar Rp.2.031.504.600,- kemudian terealisasi anggaran adalah sebesar Rp.1.878.148.911,- dan sisa anggaran yang dikembalikan ke kas daerah sebagai silpa adalah berjumlah Rp.153.355.689,-.

Pada prinsipnya semua subkegiatan memenuhi target Renstra dan pada subkegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kab/Kota dan subkegiatan Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

berkala pelaksanaan pembangunan daerah capaiannya yaitu 100%.

Khusus pada tiga subkegiatan tersebut, fokus kegiatan adalah monitoring kegiatan kelapangan dan kegiatan Tim Ahli Gubernur (TAG), yang mana tim ini mempunyai tugas penting adalah membantu kinerja Gubernur secara keseluruhan melalui pendampingan ke setiap perangkat daerah yang ada di Provinsi Jambi.

Gambar 3.2

Tim Ahli Gubernur (T.A.G) Bersama Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2023.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2023



Prof Ermaya Tegaskan Pimpinan OPD Harus Ada Inovasi Menjabarkan Program Jambi Mantap - Betara.id

Sumber : Dokumen Bappeda bidang PPED Tahun 2023.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

6. Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral Dengan Rencana Spasial.

Indikator capaian sasaran strategis kesatu Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Integratif dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi yang dikuatkan pada indikator sasaran yang **keenam** yaitu Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral Dengan Rencana Spasial, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.17 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023,
Target dan Target Renstra.

| Indikator Sasaran | Realisasi T.2022 | Target T. 2023 | Realisasi Kinerja T. 2023 | Capaian Kinerja T.2023 | Target Renstra |
|---|------------------|----------------|---------------------------|------------------------|----------------|
| Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral Dengan Rencana Spasial. | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber : Data diolah, Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022-2026.

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral Dengan Rencana Spasial, dapat dikategorikan memenuhi target Renstra yaitu hanya sebesar 100% sedangkan target Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022-2026 sebesar 100%, terdapat perbedaan dengan realisasi pada tahun 2022 yaitu sebesar 95%.

Untuk mendorong realisasi capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral Dengan Rencana Spasial, didukung dengan anggaran biaya yang tertera pada tabel program PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, pada satu kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan serta didukung oleh beberapa subkegiatan yaitu Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.18 Program/kegiatan/subkegiatan penunjang
Indikator Sasaran keenam.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

| No | Program / Kegiatan | Jenis Belanja | | | | Anggaran Belanja | Realisasi Jenis Belanja | | | | Realisasi Anggaran Belanja | % Realisasi Keuangan | % Realisasi Fisik | Sisa Anggaran | PRESENT ASE % |
|---|---|-----------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | | | | |
| II. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 1.002.183.900 | 0 | 0 | 0 | 1.002.183.900 | 860.791.192 | 0 | 0 | 0 | 860.791.192 | 85,89 | 85,89 | 141.392.708 | 16% |
| 1 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi | 1.002.183.900 | 0 | 0 | 0 | 1.002.183.900 | 860.791.192 | 0 | 0 | 0 | 860.791.192 | 85,89 | 85,89 | 141.392.708 | 16% |

Sumber : Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023.

Pada tabel di atas, dapat disampaikan bahwa untuk satu program terdapat satu kegiatan dan satu subkegiatan yaitu subkegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, lalu untuk anggaran biaya pada satu kegiatan dimaksud dengan total nilai pada anggaran sebesar Rp.1.002.183.900,- lalu pada subkegiatan ini serapan anggaran hanya mencapai 85,89% jauh dari target Renstra, kemudian pada subkegiatan tersebut terdapat efesiensi anggaran sebesar Rp.141.392.708,- dari jumlah anggaran biaya yang tersedia.

Fokus dari kegiatan ini adalah bagaimana ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah, kesesuaian antar dokumen dengan target 100% dan dengan harapan bisa terealisasi 100%, sumber data diolah dari hasil verifikasi yang dilakukan terhadap Dokumen Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022-2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2022-2026, RKPD Provinsi Jambi Tahun 2023 dan KUA PPAS Tahun 2023.

7. Presentase Keterisian Data dan Rencana Dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Pada sasaran strategis kesatu Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Integratif dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi yang dikuatkan pada indikator sasaran yang **ketujuh** yaitu Presentase Keterisian Data dan Rencana Dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), target-target yang telah dirancang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

Tabel 3.19

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023, Target dan Target Renstra.

| Indikator Sasaran | Realisasi T.2022 | Target T. 2023 | Realisasi Kinerja T. 2023 | Capaian Kinerja T.2023 | Target Renstra |
|---|------------------|----------------|---------------------------|------------------------|----------------|
| Presentase Keterisian Data dan Rencana Dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) | 77,72% | 75% | 91,54% | 100% | 75% |

Sumber : Data diolah, Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022-2026.

Pada tabel diatas, dapat disampaikan bahwa realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran Presentase Keterisian Data dan Rencana Dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), SUDAH memenuhi target Renstra yaitu hanya sebesar 91,54% sedangkan target Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022-2026 hanya sebesar 75%.

Dan untuk mendorong realisasi capaian kinerja pada indikator sasaran Presentase Keterisian Data dan Rencana Dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), didukung dengan anggaran biaya yang tertera pada tabel program PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH. Pada satu kegiatan yaitu Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta didukung oleh dua subkegiatan dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.20 Program/kegiatan/subkegiatan penunjang Indikator Sasaran ketujuh.

| No | Program / Kegiatan | Jenis Belanja | | | | Anggaran Belanja | Realisasi Jenis Belanja | | | | Realisasi Anggaran Belanja | % Realisasi Keuangan | % Realisasi Fisik | Sisa Anggaran | PERSENTASE % |
|---|---|-----------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | | | | |
| II. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan | | 297.903.301 | 0 | 0 | 0 | 297.903.301 | 272.691.390 | 0 | 0 | 0 | 272.691.390 | 91,54 | 100,00 | 25.211.911 | 9,25% |
| 1 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 73.313.528 | 0 | 0 | 0 | 73.313.528 | 62.632.541 | 0 | 0 | 0 | 62.632.541 | 85,43 | 100,00 | 10.680.987 | 17,05% |
| 2 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 128.911.128 | 0 | 0 | 0 | 128.911.128 | 115.431.128 | 0 | 0 | 0 | 115.431.128 | 89,54 | 100,00 | 13.480.000 | 11,68% |
| 3 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota | 50.678.645 | 0 | 0 | 0 | 50.678.645 | 49.672.721 | 0 | 0 | 0 | 49.672.721 | 98,02 | 100,00 | 1.005.924 | 2,03% |
| 4 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | 44.955.000 | 0 | 0 | 0 | 44.955.000 | 99,90 | 100,00 | 45.000 | 0,10% |

Sumber : Data diolah dan Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

Pada tabel di atas dapat disampaikan bahwa untuk satu program terdapat satu kegiatan dan empat subkegiatan, kemudian anggaran biaya untuk satu kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.297.903.301,- pada kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serapannya adalah sebesar 91,54%. Kemudian pada empat subkegiatan tersebut terdapat silpa atau sisa anggaran bisa juga disebut dengan efisiensi anggaran dengan jumlah sebesar Rp.25.211.911 dari jumlah anggaran yang tersedia.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi pada Tahun 2023 untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah yang baik dan **SMART** antara lain :

1. Optimalisasi proses perencanaan melalui :

- a. Peningkatan kualitas pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD Tahun 2023, melalui :
 - ✓ Melaksanakan Konsultasi Publik RKPD Tahun 2024 tepat waktu, telah dilaksanakan pada awal tahun 2023.
 - ✓ Menghadirkan berbagai element dan unsur masyarakat yang aktif memberikan saran, pandangan dan masukan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 yang disusun.
 - ✓ Pelaksanaan diselenggarakan secara offline dan online melalui media zoom meeting dan canal Youtube agar bisa diikuti oleh seluruh masyarakat Provinsi Jambi.
 - b. Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang RPJMD Tahun 2022-2026
 - c. Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2023
 - d. Melaksanakan Musrenbang RKPD Tahun 2024 pada tanggal 05 April 2023.
2. Meningkatkan kesesuaian, kekonsistenan dan sinergitas antar dokumen perencanaan, melalui :
- a. Orientasi penyamaan pemahaman dan persepsi Perangkat Daerah terkait dengan kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra.
 - b. Melaksanakan orientasi penyamaan pemahaman dan persepsi dalam Penyusunan sasaran dan indikator sasaran dalam RPJMD dengan Penyusunan Cascading untuk Laporan Akuntabilitas bersama OPD.

- c. Melakukan verifikasi data IKU, IKD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD melalui perumusan definisi operasional, rumusan masing-masing indikator dan kegunaan indikator dalam rangka menjaga keakuratan data yang disajikan dalam dokumen perencanaan.
 - d. Melegalformalkan perumusan definisi operasional, rumus masing-masing indikator dan kegunaan indikator melalui Peraturan Gubernur.
 - e. Melakukan percepatan persiapan penyusunan dokumen Renja dan RKPD Tahun 2023 pada triwulan IV Tahun 2023 guna menjaga konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan.
 - f. Melakukan *kick off* penyusunan RKPD 2025 dengan tujuan untuk lebih bisa melakukan penajaman-penajaman dalam penyusunan Renja dan RKPD.
 - g. Meningkatkan kualitas pelaksanaan verifikasi terhadap Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
 - h. Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan kabupaten/kota.
3. Melakukan pengembangan Aplikasi *E-Paket*, *E-Planing* dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan.
 4. Melakukan perbaikan/revisi terhadap indikator kinerja, Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk masa kerja Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022-2026, dengan indikator kinerja yang lebih **SMART** dan mudah diukur.

Dalam pencapaian keberhasilan peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi juga ditemukan beberapa kendala dan faktor penghambat, antara lain :

1. Masih banyak OPD yang belum memahami tahapan perencanaan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017. Dalam hal ini, strategi perbaikan yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi adalah meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah, salah satunya

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

melalui sosialisasi Kalender Perencanaan.

2. Hasil verifikasi terhadap dokumen rencana kerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh OPD, dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi akan memberikan *punishment* kepada Perangkat Daerah yang tidak menindaklanjuti hasil verifikasi serta meningkatkan kinerja internal melalui peningkatkan *monev* dalam penyusunan dokumen perencanaan.
3. Pemahaman OPD terhadap kebutuhan data dalam penyusunan dokumen perencanaan masih terbatas. Dalam hal ini strategi perbaikan yang akan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi adalah melakukan koordinasi secara berkala dengan OPD serta mengoptimalkan Forum Satu Data Indonesia.

Anggaran, realisasi belanja dan efisiensi yang dicapai tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.22

Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2023 Pada Sasaran Strategis 1 Yaitu Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Integratif Dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2023

| NO | Sasaran Strategis | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2021-2026 | | REALISASI ANGGARAN | | | Jumlah Total Anggaran | EFISIENSI / CAPAIAN / SISA ANGGARAN | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---|--|--|------------------|---|---------------|--------------------|------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|--|
| | | | | | K | Rp | K | % | Rp | | % | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | | 9 | | 10 |
| 1 | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Integratif Dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi | | Konsistensi Program RPJMD Dalam RKPD | % | 100% | | | | | | | | |
| | | | Konsistensi rencana Sektoral dengan rencana spasial | % | 100% | | | | | | | | |
| | | | Predikat AKIP Perangkat Daerah | Nilai Akip | A Nilai Akip | | | | | | | | |
| | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 1. Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor ekonomi dan SDA | % | 98 Persen | 2.075.000.000 | | | | | | | |
| | | | 2. Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor infrastruktur dan kewilayahan | % | 96 Persen | 3.300.000.000 | | | | | | | |
| | | | 3. Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor pemerintahan dan pembangunan manusia | % | 96 Persen | 2.212.490.000 | | | 4.053.889.228 | | | | |
| | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Presentase capaian perencanaan tahunan pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat, bidang pembangunan manusia dan bidang pemerintahan | % | 100 % | 1.050.000.000 | 100 | 99% | 565.185.135 | 561.060.793 | 0,73% | 4.124.342 | Bidang PPM |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yg Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | | | 1 | 100% | 17.323.059 | 17.322.699 | 0,00 | 360 | |
| | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan | Perangkat Daerah | | | 5 | 98% | 35.162.060 | 34.436.142 | 0,02 | 725.918 | |
| | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan | Perangkat Daerah | | | 5 | 99% | 4.449.356 | 4.393.344 | 0,01 | 56.012 | |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pemerintahan | Laporan | | | 0 | 100% | 80.900.000 | 80.900.000 | - | - | |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pemerintahan | Laporan | | | 1 | 100% | 137.320.000 | 137.320.000 | - | - | |
| | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia | Perangkat Daerah | | | 9 | 97% | 86.216.990 | 83.799.388 | 0,03 | 2.417.602 | |
| | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia | Perangkat Daerah | | | 9 | 89% | 6.003.770 | 5.329.320 | 0,11 | 674.450 | |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pembangunan Manusia | Laporan | | | 0 | 100% | 197.809.900 | 197.559.900 | 0,00 | 250.000 | |

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2023

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|-------|---------------|-----|--------|---------------|---------------|-------|------------|----------------------|
| Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Integratif Dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Presentase capaian perencanaan tahunan pembangunan bidang ekonomi kreatif, bidang perekonomian & bidang SDA | % | 100 % | 3.532.640.700 | 100 | 99,0% | 2.930.188.494 | 2.961.215.000 | 1,06% | 31.026.506 | Bidang Ekonomi & SDA |
| | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | | | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | |
| | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian | Perangkat Daerah | | | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | |
| | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian | Perangkat Daerah | | | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD / RPJMD pada Bidang Perekonomian | Laporan | | | 2 | 100% | 348.359.865 | 348.810.000 | 0,13% | 450.135 | |
| | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPF, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | | | 0 | 99,0% | 672.633.418 | 679.305.000 | 0,99% | 6.671.582 | |
| | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA | Perangkat Daerah | | | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | |
| | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA | Perangkat Daerah | | | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra /Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | Laporan | | | 1 | 98,8% | 1.909.195.211 | 1.933.100.000 | 1,25% | 23.904.789 | |
| | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Presentase capaian perencanaan tahunan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | % | 100 % | 1.350.000.000 | 100 | 99,8% | 558.515.599 | 559.769.353 | 0,22% | 1.253.754 | Bidang Imfraswil |
| | Koordinasi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, RKPD) | Dokumen | | | | 99,5% | 26.875.282 | 27.005.002 | 0,48% | 129.720 | |
| | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur | Perangkat Daerah | | | | 99,9% | 11.197.940 | 11.203.941 | 0,05% | 6.001 | |
| | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur | Perangkat Daerah | | | | 99,6% | 50.706.451 | 50.887.951 | 0,36% | 181.500 | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | Laporan | | | | 100,0% | 266.467.348 | 266.493.348 | 0,01% | 26.000 | |
| | Koordinasi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, RKPD) | Dokumen | | | | 99,5% | 25.536.904 | 25.668.102 | 0,51% | 131.198 | |
| | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan | Perangkat Daerah | | | | 100,0% | 7.984.351 | 7.984.351 | 0,00% | - | |
| | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan | Perangkat Daerah | | | | 98,3% | 36.097.051 | 36.721.051 | 1,73% | 624.000 | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra /Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | Laporan | | | | 99,9% | 133.650.272 | 133.805.607 | 0,12% | 155.335 | |

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2023

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|------------|---------------|-----|--------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------|--|
| Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Integratif Dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi | | Persentase capaian program Perangkat daerah | | 90% | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Dokumen Perencanaan yang dipublikasikan | | 100% | | | | | | | | | |
| | | Persentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Pembangunan Daerah | | 100% | | | | | | | | | |
| | | 2. Konsistensi program RKPD dalam APBD | | 100 Persen | 6.609.170.000 | | | 3.638.022.718 | | | | | |
| | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Persentase Dokumen Perencanaan Daerah Diselesaikan Tepat Waktu | | 100 % | 5.585.403.700 | 100 | 75,0% | 2.032.834.540 | 2.708.984.206 | 33,26% | 676.149.666 | Bidang PPED | |
| | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | Dokumen | | | 1 | 83,1% | 545.652.123 | 656.666.400 | 20,35% | 111.014.277 | | |
| | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | Berita Acara | | | 1 | 96,9% | 108.853.410 | 112.390.306 | 3,25% | 3.536.896 | | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah | Berita Acara | | | 1 | 99,9% | 67.852.736 | 67.944.200 | 0,13% | 91.464 | | |
| | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi | Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi, Kabupaten/Kota | Berita Acara | | | 1 | 51,7% | 449.685.079 | 869.799.400 | 93,42% | 420.114.321 | | |
| | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | Dokumen | | | 27 | 85,9% | 860.791.192 | 1.002.183.900 | 16,43% | 141.392.708 | | |
| | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan data sektoral untuk perencanaan Pembangunan Daerah | | 80 % | 275.007.000 | 12 | 91,5% | 272.691.390 | 297.903.301 | 9,25% | 25.211.911 | Bidang PPED | |
| | Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | Masukan | | | 1 | 85,4% | 62.632.541 | 73.313.528 | 17,05% | 10.680.987 | | |
| | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | Orang | | | 35 | 89,5% | 115.431.128 | 128.911.128 | 11,68% | 13.480.000 | | |
| | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Orang | | | 0 | 98,0% | 49.672.721 | 50.678.645 | 2,03% | 1.005.924 | | |
| | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | Buku | | | 0 | 99,9% | 44.955.000 | 45.000.000 | 0,10% | 45.000 | | |
| | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase hasil Monitoring evaluasi pembangunan yang dijadikan dasar perencanaan | | 90 % | 3.369.670.000 | 100 | 96,9% | 1.332.496.788 | 1.374.838.200 | 3,18% | 42.341.412 | Bidang PPED | |
| | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | Laporan | | | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,00% | - | | |
| | Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah | Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya | Kerja Sama | | | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,00% | - | | |
| | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | Laporan | | | 1 | 96,9% | 1.314.332.788 | 1.356.674.200 | 3,22% | 42.341.412 | | |
| | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten / Kota yang Difasilitasi / Evaluasi | Dokumen | | | 27 | 100,0% | 18.164.000 | 18.164.000 | 0,00% | - | | |

Sumber : Evaluasi Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

| | |
|----------------------|--|
| SASARAN STRATEGIS II | Meningkatkan Akuntabilitas Dan Kapabilitas Instansi Bappeda Provinsi Jambi |
|----------------------|--|

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan kapabilitas instansi Bappeda Provinsi Jambi yang diselaraskan dengan manajemen tata kelola organisasi yang baik diperlukan dalam rangka mendukung dan menentukan keberhasilan jalannya organisasi, baik pengelolaan secara *internal* maupun secara *ekternal*.

Untuk melihat keberhasilan tata kelola organisasi tersebut maka ditetapkan sasaran strategis yaitu ***Meningkatkan Akuntabilitas Dan Kapabilitas Instansi Bappeda Provinsi Jambi***. Gambaran pencapaian sasaran strategis ini pada Bappeda Provinsi Jambi dapat dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja pada perjanjian kinerja sebelumnya yang diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu :

1. Indikator Sasaran Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah.

Untuk capaian sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Kapabilitas Instansi Bappeda Provinsi Jambi, maka dikuatkan pada indikator sasaran yang ***pertama*** yakni Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.23
Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023, Target dan Target Renstra.

| Indikator Sasaran | Realisasi T.2022 | Target T. 2023 | Realisasi Kinerja T. 2023 | Capaian Kinerja T.2023 | Target Renstra |
|--|--------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|----------------|
| Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Nilai Huruf "A" Nilai Angka 80,90 | B | - | - | B |

Sumber : Data diolah, Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022-2026.

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah pada realisasi tahun 2022 mendapat nilai A dengan presentase angka 80,90%.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

Sementara target Renstra Bappeda Tahun 2022-2026 hanya Huruf “B”, namun dalam hal ini realisasi yang diharapkan untuk nilai AKIP pada tahun 2023 bisa mencapai 100%. Untuk itu, guna mendorong realisasi capaian kinerja pada indikator sasaran Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah didukung anggaran biaya yang tertera pada satu program, satu kegiatan dan empat subkegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.24

Program/Kegiatan/Subkegiatan Penunjang Indikator Sasaran Kesatu
Pada Sasaran Strategis Kedua.

| No | Program / Kegiatan | Jenis Belanja | | | | Anggaran Belanja | Realisasi Jenis Belanja | | | | Realisasi Anggaran Belanja | % Realisasi Keuangan | % Realisasi Fisik | Sisa Anggaran | PRESENTAS E % |
|---|---|-----------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | | | | |
| I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perngkat Daerah | | 200.010.247 | 10.350.000 | 0 | 0 | 210.360.247 | 192.300.477 | 10.350.000 | 0 | 0 | 202.650.477 | 96,33 | 100,00 | 7.709.770 | 3,80% |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 22.614.169 | 6.325.000 | 0 | 0 | 28.939.169 | 19.811.253 | 6.325.000 | 0 | 0 | 26.136.253 | 90,31 | 100,00 | 2.802.916 | 10,72% |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 24.856.378 | 0 | 0 | 0 | 24.856.378 | 24.522.927 | 0 | 0 | 0 | 24.522.927 | 98,66 | 100,00 | 333.451 | 1,36% |
| 3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 152.539.700 | 4.025.000 | 0 | 0 | 156.564.700 | 147.966.297 | 4.025.000 | 0 | 0 | 151.991.297 | 97,08 | 100,00 | 4.573.403 | 3,01% |

Sumber : Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023.

Pada tabel di atas dapat disampaikan bahwa untuk satu program dan terdapat satu kegiatan serta terdapat tiga subkegiatan, kemudian anggaran biaya untuk satu kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.210.360.247,- lalu pada pada semua subkegiatan dianggap memenuhi target Renstra. Kemudian pada semua subkegiatan tersebut terdapat efisiensi atau sisa anggaran dengan jumlah sebesar Rp.7.709.770,- realisasi keuangan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.202.650.477,- maka secara realisasi nilai AKIP pada tahun 2022 melebihi target yang disediakan.

2. Indikator Sasaran Presentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dipublikasikan dan Tepat Waktu.

Untuk capaian sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Kapabilitas Instansi Bappeda Provinsi Jambi, didorong dan dikuatkan pada indikator sasaran yang **kedua** yakni Indikator Sasaran Presentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dipublikasikan dan Tepat Waktu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

Tabel 3.25

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023, Target dan Target Renstra.

| Indikator Sasaran | Realisasi T.2022 | Target T. 2023 | Realisasi Kinerja T. 2023 | Capaian Kinerja T.2023 | Target Renstra |
|--|------------------|----------------|---------------------------|------------------------|----------------|
| Presentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dipublikasikan dan Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber : Data diolah, Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022-2026.

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran Indikator Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dipublikasikan dan Tepat Waktu pada realisasi tahun 2023 dengan presentase angka sebesar 100%, sementara target Renstra Bappeda Tahun 2022-2026 adalah 100%. Untuk itu, guna mendorong realisasi capaian kinerja pada indikator sasaran Presentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dipublikasikan dan Tepat Waktu dengan didukung anggaran biaya yang tertera pada satu program, dua kegiatan dan enam subkegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.26 Program/Kegiatan/Subkegiatan Penunjang Indikator Sasaran Kedua
Pada Sasaran Strategis Kedua.

| No | Program / Kegiatan | Jenis Belanja | | | | Anggaran Belanja | Realisasi Jenis Belanja | | | | Realisasi Anggaran Belanja | % Realisasi Keuangan | % Realisasi Fisik | Sisa Anggaran | PRESENTA E % |
|--|--|-----------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|---------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfe r | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | | | | |
| I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12.837.242.661 | 0 | 0 | 0 | 12.837.242.661 | 12.502.296.532 | 0 | 0 | 0 | 12.502.296.532 | 97,39 | 100,00 | 334.946.129 | 2,68% |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12.624.928.261 | 0 | 0 | 0 | 12.624.928.261 | 12.292.754.133 | 0 | 0 | 0 | 12.292.754.133 | 97,37 | 100,00 | 332.174.128 | 2,70% |
| 2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 212.314.400 | 0 | 0 | 0 | 212.314.400 | 209.542.399 | 0 | 0 | 0 | 209.542.399 | 98,69 | 100,00 | 2.772.001 | 1,32% |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 724.034.456 | 328.976.176 | 0 | 0 | 1.053.010.632 | 715.405.104 | 327.490.000 | 0 | 0 | 1.042.895.104 | 99,04 | 100,00 | 10.115.528 | 0,97% |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 22.565.800 | 0 | 0 | 0 | 22.565.800 | 22.565.600 | 0 | 0 | 0 | 22.565.600 | 100,00 | 100,00 | 200 | 0,00% |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 73.302.070 | 328.976.176 | 0 | 0 | 402.278.246 | 72.390.880 | 327.490.000 | 0 | 0 | 399.880.880 | 99,40 | 100,00 | 2.397.366 | 0,60% |
| 3 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 179.673.000 | 0 | 0 | 0 | 179.673.000 | 173.077.875 | 0 | 0 | 0 | 173.077.875 | 96,33 | 100,00 | 6.595.125 | 3,81% |
| 4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 425.035.886 | 0 | 0 | 0 | 425.035.886 | 425.035.832 | 0 | 0 | 0 | 425.035.832 | 100,00 | 100,00 | 54 | 0,00% |
| 5 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 23.457.700 | 0 | 0 | 0 | 23.457.700 | 22.334.917 | 0 | 0 | 0 | 22.334.917 | 95,21 | 100,00 | 1.122.783 | 5,03% |

Sumber : Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023.

Pada tabel diatas dapat disampaikan bahwa untuk PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI terdapat dua kegiatan dan tujuh subkegiatan, kemudian anggaran biaya untuk dua kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.13.890.253.293,- sudah termasuk gaji

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

dan tunjangan, pada dua kegiatan tersebut realisasi keuangan adalah sebesar Rp.13.545.191.636,- dengan persentase sebesar 97,39% Dari dua subkegiatan dimaksud terdapat efesiensi anggaran sebesar Rp.345.061.657,- yang dikembalikan ke kas daerah Provinsi Jambi.

3. Dan Indikator sasaran Presentase Peningkatan Fungsional Tertentu Pada Perangkat Daerah.

Untuk capaian sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Kapabilitas Instansi Bappeda Provinsi Jambi, didorong dan dikuatkan pada indikator sasaran yang **ketiga** yakni Indikator Sasaran Presentase Peningkatan Fungsional Tertentu Pada Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.27

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023, Target dan Target Renstra.

| Indikator Sasaran | Realisasi T.2022 | Target T. 2023 | Realisasi Kinerja T. 2023 | Capaian Kinerja T.2023 | Target Renstra |
|--|------------------|----------------|---------------------------|------------------------|----------------|
| Presentase Peningkatan Fungsional Tertentu Pada Perangkat Daerah | 20,97% | 30% | 20,97% | 69,9% | 30% |

Sumber : Data diolah, Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022-2026.

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran Presentase Peningkatan Fungsional Tertentu Pada Perangkat Daerah pada realisasi tahun 2023 dengan presentase angka sebesar 69,9%, sementara target Renstra Bappeda Tahun 2022-2026 adalah 30%. Untuk itu, guna mendorong realisasi capaian kinerja pada indikator sasaran Presentase Peningkatan Fungsional Tertentu Pada Perangkat Daerah dengan didukung anggaran biaya yang tertera pada satu program, satu kegiatan dan dua subkegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.28 Program/Kegiatan/Subkegiatan Penunjang Indikator Sasaran Ketiga Pada Sasaran Strategis Kedua.

| Rada Sasaran Strategis Kedua: | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------|--------------|
| No | Program / Kegiatan | Jenis Belanja | | | | Anggaran Belanja | Realisasi Jenis Belanja | | | | Realisasi Anggaran Belanja | % Realisasi Keuangan | % Realisasi Fisik | Sisa Anggaran | PERSENTASE % |
| | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | | | | |
| I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 1 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

Sumber : Data diolah dan Renja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023.

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada APBD Murni tahun 2023 Biaya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi berjumlah Rp.20.000.000,-. Lalu pada pertengahan jalan adanya rasionalisasi, maka anggaran tersebut dipangkas.

Namun pada kenyataannya, walaupun tidak adanya Anggaran pada subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, tetap saja subkegiatan ini berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya Aparatus Sipil Negara (ASN) yang mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh berbagai instansi, bisa disampaikan adalah sebagai berikut :

1. **Syamsul Bahri, S.Sos.,MT.,MA.** Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Revolusi Mental Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia bagi para Aparatur Sipil Negara Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi di Kampus Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia. Di Astha Hannas Binong, Subang Jawa Barat Tanggal 09 s/d 14 Oktober 2023.
2. **Darmawansyah.S.E.** Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Program Studi Magister Ilmu Lingkungan (PSMIL) Sekolah Pascasarjana serta Pusat Unggulan Lingkungan dan Ilmu Keberlanjutan (PULIK) Universitas Padjajaran, di Bandung Tanggal 9 s/d 20 Oktober 2023.
3. **Ir. Zaenal Arifin, M.Sc.** Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Program Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FEUI), di Jakarta Tanggal 13 September 2023

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi pada Tahun 2023 untuk mencapai

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

sasaran strategis yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Dan Kapabilitas Instansi Bappeda Provinsi Jambi dapat diukur melalui indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja antara lain:

1. Menyempurnakan *cascading* kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dengan merumuskan *cascading* sampai ke level staff.
2. Menyempurnakan IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dalam Renstra Bappeda Tahun 2022-2026.
3. Menyempurnakan Rencana Aksi secara berjenjang.
4. Membuat Peta Proses Bisnis sesuai dengan Renstra.
5. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian target Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi secara triwulanan.
6. Telah menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026.
7. Menerapkan *reward* dan *punishment* dalam pencapaian kinerja ASN lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.

Dalam pencapaian keberhasilan pencapaian sasaran kedua ini pada Organisasi perencanaan pembangunan daerah Jambi juga ditemukan beberapa **Kendala Dan Faktor Penghambat**, antara lain :

1. Belum optimalnya implementasi dan evaluasi terhadap SOP organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.
2. Belum optimalnya implementasi SPIP secara menyeluruh di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, maka dalam menyusun konsep Perencanaan dan Penganggaran internal Bappeda sering diabaikan resiko dari penempatan penggunaan anggaran yang tidak efisien dan tidak tepat sasaran.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Dan Kapabilitas Instansi Bappeda Provinsi Jambi secara lengkap disajikan pada tabel 3.29 sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2023

| NO | Sasaran Strategis | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2021-2026 | | REALISASI ANGGARAN | | | Jumlah Total Anggaran | EFISIENSI / CAPAIAN / SISA ANGGARAN | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|--|--|--|--------------|--|----------------|--------------------|-----|----------------|--------------------------|--|-------------|---|
| | | | | | K | Rp | K | % | Rp | | % | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | | 9 | | 10 |
| 2 | Meningkatnya Akutabilitas Dan Kapabilitas Instansi Bappeda Provinsi Jambi | | Konsistensi Program RPJMD Dalam RKPD | | 100% | | | | | | | | |
| | | | Konsistensi rencana Sektoral dengan rencana spasial | | 100% | | | | | | | | |
| | | | Predikat AKIP Perangkat Daerah | | A Nilai Akip | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Predikat AKIP Perangkat Daerah | Nilai Akip | A Nilai Akip | 15.552.803.818 | | | 14.524.693.802 | | | | |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | % | 100 % | 250.000.000 | 100 | 96% | 202.650.477 | 210.360.247 | 3,80% | 7.709.770 | Sekretariat |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | | | 0 | 90% | 26.136.253 | 28.939.169 | 10,72% | 2.802.916 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | | | 0 | 0% | - | - | 0,00% | - | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | | | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | | | 4 | 99% | 24.522.927 | 24.856.378 | 1,36% | 333.451 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | | | 0 | | - | - | 0 | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen | | | 0 | | - | - | 0 | | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | | | 2 | 97% | 151.991.297 | 156.564.700 | 3,01% | 4.573.403 | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | - | - | 0 | - | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 % | 13.503.462.389 | | 97% | 12.502.296.532 | 12.837.242.661 | 2,68% | 334.946.129 | Sekretariat |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/ Bulan | | | 97 | 97% | 12.292.754.133 | 12.624.928.261 | 2,70% | 332.174.128 | |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | | | 2 | 0% | 209.542.399 | 212.314.400 | 1,32% | 2.772.001 | |
| | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | | | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | | | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD & Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD | Laporan | | | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | 100 % | 50.000.000 | 100 | | - | - | | - | Sekretariat |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | | | | | - | - | | - | |
| | | | | | | | | | - | - | | - | |

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2023

| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | 100 % | 450.982.899 | 100 | 99% | 422.446.480 | 424.844.046 | 0,57% | 2.397.566 | |
|---|--|--|--|---------|-------|-------------|-----|------|-------------|-------------|-------|------------|-------------|
| Meningkatnya Akutabilitas Dan Kapabilitas Instansi Bappeda Provinsi Jambi | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | | | 1 | 100% | 22.565.600 | 22.565.800 | 0,00% | 200 | Sekretariat |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | | | 1 | 99% | 399.880.880 | 402.278.246 | 0,60% | 2.397.366 | |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | | | 0 | | | | | | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | | | 0 | | | | | | |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | | | 0 | | | | | | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | | | 0 | | | | | | |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | | | 0 | | | | | | |
| | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | | | 12 | 96% | 173.077.875 | 179.673.000 | 3,81% | 6.595.125 | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | | | 5 | 100% | 425.035.832 | 425.035.886 | 0,00% | 54 | |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | | | 0 | 95% | 22.334.917 | 23.457.700 | 5,03% | 1.122.783 | |
| | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | | | 0 | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | 100 % | 950.461.530 | 100 | 98% | 836.128.456 | 849.343.119 | 1,58% | 13.214.663 | Sekretariat |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | | | 1 | 96% | 299.338.420 | 312.463.119 | 4,38% | 13.124.699 | |
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | | | 1 | 100% | 536.790.036 | 536.880.000 | 0,02% | 89.964 | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan jasa Pemeliharaan/ Rehabilitasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah | % | 100 % | 347.897.000 | 100 | 98% | 561.171.857 | 571.160.000 | 1,78% | 9.988.143 | Sekretariat |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Unit | | | 32 | 99% | 86.522.700 | 87.580.000 | 1,22% | 1.057.300 | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | | | 36 | 98% | 412.485.200 | 421.410.000 | 2,16% | 8.924.800 | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | | | 75 | 100% | 62.163.957 | 62.170.000 | 0,01% | 6.043 | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | | | 0 | | - | | | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi | Unit | | | 0 | 100% | 49.900.000 | 50.000.000 | 0,20% | 100.000 | |

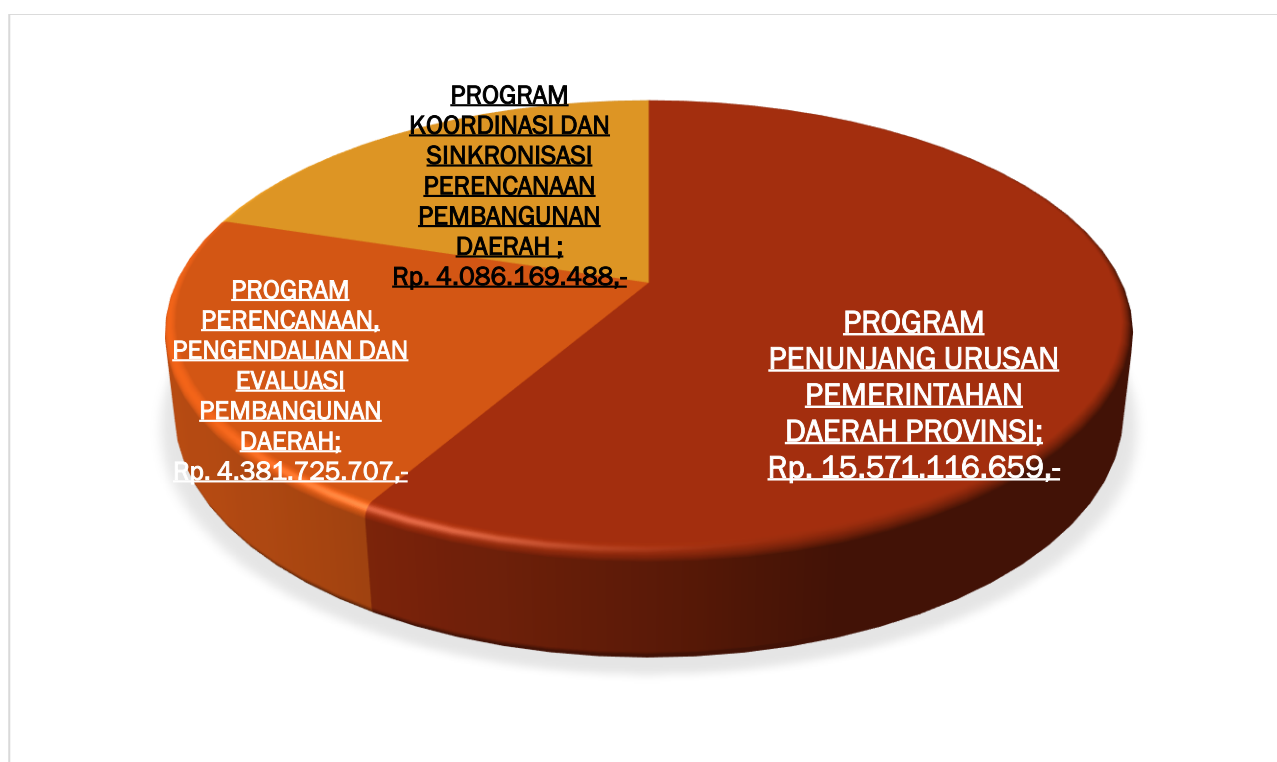
Sumber : Data diolah, Renja Bappeda Tahun 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

3.4 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Anggaran belanja daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 24.039.011.854,- Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang diimplementasikan dalam 3 (tiga) Program dengan rincian pembagian anggaran sebagaimana tersaji pada grafik berikut :

GRAFIK DIAGRAM 3.1
Komposisi Belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2023



Sumber : DPA Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023.

Anggaran dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.30
Realiasi Penggunaan Anggaran 2023 yang dialokasikan untuk membiayai
Program/kegiatan dalam Pencapaian Sasaran Bappeda Provinsi Jambi.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2023

| No | Program / Kegiatan | Jenis Belanja | | | | Anggaran Belanja | Realisasi Jenis Belanja | | | | Realisasi Anggaran Belanja | % Realisasi Keuangan | % Realisasi Fisik | Sisa Anggaran | PERSENT ASE % |
|---|--|-----------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | | | | |
| I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perngkat Daerah | | 200.010.247 | 10.350.000 | 0 | 0 | 210.360.247 | 192.300.477 | 10.350.000 | 0 | 0 | 202.650.477 | 96,33 | 100,00 | 7.709.770 | 3,80% |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 22.614.169 | 6.325.000 | 0 | 0 | 28.939.169 | 19.811.253 | 6.325.000 | 0 | 0 | 26.136.253 | 90,31 | 100,00 | 2.802.916 | 10,72% |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 24.856.378 | 0 | 0 | 0 | 24.856.378 | 24.522.927 | 0 | 0 | 0 | 24.522.927 | 98,66 | 100,00 | 333.451 | 1,36% |
| 3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 152.539.700 | 4.025.000 | 0 | 0 | 156.564.700 | 147.966.297 | 4.025.000 | 0 | 0 | 151.991.297 | 97,08 | 100,00 | 4.573.403 | 3,01% |
| 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 12.837.242.661 | 0 | 0 | 0 | 12.837.242.661 | 12.502.296.532 | 0 | 0 | 0 | 12.502.296.532 | 97,39 | 100,00 | 334.946.129 | 2,68% |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12.624.928.261 | 0 | 0 | 0 | 12.624.928.261 | 12.292.754.133 | 0 | 0 | 0 | 12.292.754.133 | 97,37 | 100,00 | 332.174.128 | 2,70% |
| 2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 212.314.400 | 0 | 0 | 0 | 212.314.400 | 209.542.399 | 0 | 0 | 0 | 209.542.399 | 98,69 | 100,00 | 2.772.001 | 1,32% |
| 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 1 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 724.034.456 | 328.976.176 | 0 | 0 | 1.053.010.632 | 715.405.104 | 327.490.000 | 0 | 0 | 1.042.895.104 | 99,04 | 100,00 | 10.115.528 | 0,97% |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 22.565.800 | 0 | 0 | 0 | 22.565.800 | 22.565.600 | 0 | 0 | 0 | 22.565.600 | 100,00 | 100,00 | 200 | 0,00% |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 73.302.070 | 328.976.176 | 0 | 0 | 402.278.246 | 72.390.880 | 327.490.000 | 0 | 0 | 399.880.880 | 99,40 | 100,00 | 2.397.366 | 0,60% |
| 3 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 179.673.000 | 0 | 0 | 0 | 179.673.000 | 173.077.875 | 0 | 0 | 0 | 173.077.875 | 96,33 | 100,00 | 6.595.125 | 3,81% |
| 4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 425.035.886 | 0 | 0 | 0 | 425.035.886 | 425.035.832 | 0 | 0 | 0 | 425.035.832 | 100,00 | 100,00 | 54 | 0,00% |
| 5 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 23.457.700 | 0 | 0 | 0 | 23.457.700 | 22.334.917 | 0 | 0 | 0 | 22.334.917 | 95,21 | 100,00 | 1.122.783 | 5,03% |

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2023

| No | Program / Kegiatan | Jenis Belanja | | | | Anggaran Belanja | Realisasi Jenis Belanja | | | | Realisasi Anggaran Belanja | % Realisasi Keuangan | % Realisasi Fisik | Sisa Anggaran | PERSENT ASE % |
|--|---|-----------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | | | | |
| I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 849.343.119 | 0 | 0 | 0 | 849.343.119 | 836.128.456 | 0 | 0 | 0 | 836.128.456 | 98,44 | 100,00 | 13.214.663 | 1,58% |
| 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 312.463.119 | 0 | 0 | 0 | 312.463.119 | 299.338.420 | 0 | 0 | 0 | 299.338.420 | 95,80 | 100,00 | 13.124.699 | 4,38% |
| 2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 536.880.000 | 0 | 0 | 0 | 536.880.000 | 536.790.036 | 0 | 0 | 0 | 536.790.036 | 99,98 | 100,00 | 89.964 | 0,02% |
| 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 621.160.000 | 0 | 0 | 0 | 621.160.000 | 611.071.857 | 0 | 0 | 0 | 611.071.857 | 98,38 | 100,00 | 10.088.143 | 1,65% |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 87.580.000 | 0 | 0 | 0 | 87.580.000 | 86.522.700 | 0 | 0 | 0 | 86.522.700 | 98,79 | 100,00 | 1.057.300 | 1,22% |
| 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 421.410.000 | 0 | 0 | 0 | 421.410.000 | 412.485.200 | 0 | 0 | 0 | 412.485.200 | 97,88 | 100,00 | 8.924.800 | 2,16% |
| 3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 62.170.000 | 0 | 0 | 0 | 62.170.000 | 62.163.957 | 0 | 0 | 0 | 62.163.957 | 99,99 | 100,00 | 6.043 | 0,01% |
| 4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 49.900.000 | 0 | 0 | 0 | 49.900.000 | 99,80 | 100,00 | 100.000 | 0,20% |
| II. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | | 2.708.984.206 | 0 | 0 | 0 | 2.708.984.206 | 2.032.834.540 | 0 | 0 | 0 | 2.032.834.540 | 75,04 | 79,27 | 676.149.666 | 33,26% |
| 1 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | 656.666.400 | 0 | 0 | 0 | 656.666.400 | 545.652.123 | 0 | 0 | 0 | 545.652.123 | 83,09 | 100,00 | 111.014.277 | 20,35% |
| 2 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | 112.390.306 | 0 | 0 | 0 | 112.390.306 | 108.853.410 | 0 | 0 | 0 | 108.853.410 | 96,85 | 100,00 | 3.536.896 | 3,25% |
| 3 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 67.944.200 | 0 | 0 | 0 | 67.944.200 | 67.852.736 | 0 | 0 | 0 | 67.852.736 | 99,87 | 100,00 | 91.464 | 0,13% |
| 4 | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi | 869.799.400 | 0 | 0 | 0 | 869.799.400 | 449.685.079 | 0 | 0 | 0 | 449.685.079 | 51,70 | 51,70 | 420.114.321 | 93,42% |
| 5 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi | 1.002.183.900 | 0 | 0 | 0 | 1.002.183.900 | 860.791.192 | 0 | 0 | 0 | 860.791.192 | 85,89 | 85,89 | 141.392.708 | 16,43% |
| 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | 297.903.301 | 0 | 0 | 0 | 297.903.301 | 272.691.390 | 0 | 0 | 0 | 272.691.390 | 91,54 | 100,00 | 25.211.911 | 9,25% |
| 1 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 73.313.528 | 0 | 0 | 0 | 73.313.528 | 62.632.541 | 0 | 0 | 0 | 62.632.541 | 85,43 | 100,00 | 10.680.987 | 17,05% |

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2023

| No | Program / Kegiatan | Jenis Belanja | | | | Anggaran Belanja | Realisasi Jenis Belanja | | | | Realisasi Anggaran Belanja | % Realisasi Keuangan | % Realisasi Fisik | Sisa Anggaran | PERSENT ASE % |
|---|--|-----------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | | | | |
| I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 128.911.128 | 0 | 0 | 0 | 128.911.128 | 115.431.128 | 0 | 0 | 0 | 115.431.128 | 89,54 | 100,00 | 13.480.000 | 11,68% |
| 3 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 50.678.645 | 0 | 0 | 0 | 50.678.645 | 49.672.721 | 0 | 0 | 0 | 49.672.721 | 98,02 | 100,00 | 1.005.924 | 2,03% |
| 4 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | 44.955.000 | 0 | 0 | 0 | 44.955.000 | 99,90 | 100,00 | 45.000 | 0,10% |
| 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | 1.374.838.200 | 0 | 0 | 0 | 1.374.838.200 | 1.332.496.788 | 0 | 0 | 0 | 1.332.496.788 | 96,92 | 100,00 | 42.341.412 | 3,18% |
| 1 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 1.356.674.200 | 0 | 0 | 0 | 1.356.674.200 | 1.314.332.788 | 0 | 0 | 0 | 1.314.332.788 | 96,88 | 100,00 | 42.341.412 | 3,22% |
| 2 | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 18.164.000 | 0 | 0 | 0 | 18.164.000 | 18.164.000 | 0 | 0 | 0 | 18.164.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00% |
| III. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | 565.185.135 | 0 | 0 | 0 | 565.185.135 | 561.060.793 | 0 | 0 | 0 | 561.060.793 | 99,27 | 100,00 | 4.124.342 | 0,74% |
| 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 17.323.059 | 0 | 0 | 0 | 17.323.059 | 17.322.699 | 0 | 0 | 0 | 17.322.699 | 100,00 | 100,00 | 360 | 0,00% |
| 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 35.162.060 | 0 | 0 | 0 | 35.162.060 | 34.436.142 | 0 | 0 | 0 | 34.436.142 | 97,94 | 100,00 | 725.918 | 2,11% |
| 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 4.449.356 | 0 | 0 | 0 | 4.449.356 | 4.393.344 | 0 | 0 | 0 | 4.393.344 | 98,74 | 100,00 | 56.012 | 1,27% |
| 4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang | 80.900.000 | 0 | 0 | 0 | 80.900.000 | 80.900.000 | 0 | 0 | 0 | 80.900.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00% |
| 5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 137.320.000 | 0 | 0 | 0 | 137.320.000 | 137.320.000 | 0 | 0 | 0 | 137.320.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00% |
| 6 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan | 86.216.990 | 0 | 0 | 0 | 86.216.990 | 83.799.388 | 0 | 0 | 0 | 83.799.388 | 97,20 | 100,00 | 2.417.602 | 2,88% |
| 7 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 6.003.770 | 0 | 0 | 0 | 6.003.770 | 5.329.320 | 0 | 0 | 0 | 5.329.320 | 88,77 | 100,00 | 674.450 | 12,66% |
| 8 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 197.809.900 | 0 | 0 | 0 | 197.809.900 | 197.559.900 | 0 | 0 | 0 | 197.559.900 | 99,87 | 100,00 | 250.000 | 0,13% |

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2023

| No | Program / Kegiatan | Jenis Belanja | | | | Anggaran Belanja | Realisasi Jenis Belanja | | | | Realisasi Anggaran Belanja | % Realisasi Keuangan | % Realisasi Fisik | Sisa Anggaran | PERSENT ASE % |
|--|--|-----------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | | | | |
| I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | 2.961.215.000 | 0 | 0 | 0 | 2.961.215.000 | 2.930.188.494 | 0 | 0 | 0 | 2.930.188.494 | 98,95 | 100,00 | 31.026.506 | 1,06% |
| 1 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang | 348.810.000 | 0 | 0 | 0 | 348.810.000 | 348.359.865 | 0 | 0 | 0 | 348.359.865 | 99,87 | 100,00 | 450.135 | 0,13% |
| 2 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan | 679.305.000 | 0 | 0 | 0 | 679.305.000 | 672.633.418 | 0 | 0 | 0 | 676.649.125 | 99,61 | 100,00 | 2.655.875 | 0,39% |
| 3 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SD | 1.933.100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.933.100.000 | 1.909.195.211 | 0 | 0 | 0 | 1.909.195.211 | 98,76 | 100,00 | 23.904.789 | 1,25% |
| 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | 559.769.353 | 0 | 0 | 0 | 559.769.353 | 558.515.599 | 0 | 0 | 0 | 558.515.599 | 99,78 | 100,00 | 1.253.754 | 0,22% |
| 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd) | 27.005.002 | 0 | 0 | 0 | 27.005.002 | 26.875.282 | 0 | 0 | 0 | 26.875.282 | 99,52 | 100,00 | 129.720 | 0,48% |
| 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 11.203.941 | 0 | 0 | 0 | 11.203.941 | 11.197.940 | 0 | 0 | 0 | 11.197.940 | 99,95 | 100,00 | 6.001 | 0,05% |
| 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 50.887.951 | 0 | 0 | 0 | 50.887.951 | 50.706.451 | 0 | 0 | 0 | 50.706.451 | 99,64 | 100,00 | 181.500 | 0,36% |
| 4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang | 266.493.348 | 0 | 0 | 0 | 266.493.348 | 266.467.348 | 0 | 0 | 0 | 266.467.348 | 99,99 | 100,00 | 26.000 | 0,01% |
| 5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd) | 25.668.102 | 0 | 0 | 0 | 25.668.102 | 25.536.904 | 0 | 0 | 0 | 25.536.904 | 99,49 | 100,00 | 131.198 | 0,51% |
| 6 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 7.984.351 | 0 | 0 | 0 | 7.984.351 | 7.984.351 | 0 | 0 | 0 | 7.984.351 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0,00% |
| 7 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 36.721.051 | 0 | 0 | 0 | 36.721.051 | 36.097.051 | 0 | 0 | 0 | 36.097.051 | 98,30 | 100,00 | 624.000 | 1,73% |
| 8 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang | 133.805.607 | 0 | 0 | 0 | 133.805.607 | 133.650.272 | 0 | 0 | 0 | 133.650.272 | 99,88 | 100,00 | 155.335 | 0,12% |
| TOTAL | | 23.699.685.678 | 339.326.176 | 0 | 0 | 24.039.011.854 | 22.544.990.030 | 337.840.000 | 0 | 0 | 22.882.830.030 | 95,19 | 97,66 | 1.156.181.824 | 5,05% |

Sumber : LPPK Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa realiasi penggunaan anggaran yang dialokasikan adalah sebesar 95,19% untuk realisasi keuangan dan 97,66% untuk realisasi fisik. Kemudian anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan dalam Pencapaian sasaran Bappeda Provinsi Jambi tahun 2023, sangat efektif dan efesien dalam penggunaannya, namun ada beberapa Kegiatan dan sub kegiatan dari 3 program yang memang masih banyak yang belum maksimal realisasinya, yaitu dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, terdapat pada kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara total pagu Rp.12.624.928.261,- terserap/terrealisasi sebesar Rp.12.292.754.133,- atau sebesar 97,37 % , sehingga ada sisa anggaran sebesar Rp.332.174.129,- ada beberapa alasan adanya Silpa adalah kelebihan cadangan dana pada belanja gaji pokok pegawai, kelebihan pembayaran TPP, dikarenakan adanya pegawai yang meninggal dunia dan pindah kantor.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pagu adalah Rp.312.463.119,- terserap/terrealisasi sebesar Rp.299.338.420,- atau sebesar 95,80%, sehingga ada pengembalian dana/silpa sebesar Rp.13.124.699,- hal ini dikarenakan seluruh pegawai menjalankan langkah-langkah penghematan penggunaan listrik dikantor disamping itu adanya suplai dari instalasi listrik tenaga surya yang dibuatkan.

B. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH,

Terdapat pada kegiatan antara lain:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, terdiri dari empat (4) subkegiatan yaitu Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah, Pelaksanaan Konsultasi Publik, Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat 2 Subkegiatan antara lain Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan satu subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Pada point “a sampai dengan c” diatas yang paling banyak silpa atau sisa anggaran yang tidak terealisasi adalah pada point “a” yaitu Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, pada kegiatan tersebut pagu yang diberikan adalah sebesar Rp.2.708.984.206,- dengan persentase serapan keuangan sebesar 75,04% atau sebesar Rp.2.032.834.540,- lalu silpa yang dikembalikan adalah sebesar Rp.676.149.666,- Ada beberapa permasalahan yang mendasar yang menjadi alasan kenapa besarnya silpa/pengembalian dana yang dilakukan, dapat di jelaskan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pasal 49 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Kepala Daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan. Lalu Gubernur Jambi sudah mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi dengan Nomor S-3191/Bappeda-2.1//XI/2023 tanggal 14 November 2023 dengan Prihal Penyampaian Rancangan Awal Perubahan-RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Selanjutnya pada pasal (4) disebutkan bahwa pembahasan dan kesepakatan rancangan awal RPJMD paling lambat 10 hari sejak diterima surat yang disampaikan oleh pihak eksekutif kepada pihak legislatif yaitu Ketua DPRD Provinsi Jambi.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

Namun pada akhir Desember tahun 2023, pihak legislatif yakni DPRD Provinsi Jambi belum juga melakukan pembahasan Rancangan Awal Perubahan-RPJMD dimaksud. Kemudian pada ayat (7) disebutkan bahwa Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pasal ayat (4) tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka Kepala Daerah dapat melanjutkan ke tahapan penyusunan berikutnya. Lalu tahapan berikutnya adalah tahapan Konsultasi Ranwal RPJMD, sebagaimana pada pasal 51, Gubernur mengkonsultasikan Ranwal RPJMD kepada Menteri melalui Dirjen Bina Bangda Kemendagri. Untuk itu, Bappeda Provinsi Jambi juga sudah menyampaikan permohonan konsultasi Ranwal kepada Kemendagri melalui surat Sekda Nomor S-3433/Bappeda-2.1/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023, namun hingga akhir tahun 2023 belum ditindaklanjuti oleh Kemendagri, sehingga tahapan pelaksanaan Musrenbang P-RPJMD tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dana yang telah dianggarkan masih belum bisa digunakan dengan mestinya.

2. Kemudian merupakan bentuk efisiensi anggaran, dengan catatan seluruh target output sub kegiatan dapat tercapai. Yang tersisa sebagian besar dari honor narasumber, karena sebagian besar narasumber internal Bappeda, serta format rapat yang lebih banyak dilakukan melalui desk, sehingga ada beberapa nilai rupiah yang dikembalikan.
3. Pada Subkegiatan penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan ini ada penyusunan dan cetak dokumen Perubahan RPJMD, oleh karena masih belum ada kesepakatan dengan DPRD, makanya pentahapan tersebut belum bisa dilanjutkan, oleh karenanya untuk Penyusunan Dokumen Rancangan P-RPJMD belum bisa dilaksanakan hingga akhir tahun 2023, tahap tersebut hanya sampai penyusunan Rancangan Awal P-RPJMD. Makanya kegiatan cetak dokumen tersebut blm bisa dilaksanakan dikarenakan dokumen Perda P-RPJMD belum tersedia.
4. Untuk agenda Musrenbang perubahan RPJMD belum bisa dilaksanakan dikarenakan prosesnya masih tertunda di DPRD, maka jumlah dana untuk subkegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi yang dikembalikan (silpa) adalah sebesar Rp.420.114.321,-

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

C. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pada program yang ketiga ini silpa yang terjadi tidak begitu signifikan, hanya terjadi pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) tepatnya pada subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA, yang mana pagu yang diberikan adalah sebesar Rp. 1.933.100.000,- lalu realisasi keuangannya adalah sebesar Rp.1.909.195.211,- atau setara dengan 98,76%. Sehingga silpa/pengembalian ke kas negara sebesar Rp.23.904.789,- dana sebesar ini dikembalikan beralasan bahwa ada sisa perjalanan dinas, makan minum rapat, namun yang paling banyak dikarenakan adanya honorarium Bio-CF Pak Sekretaris Daerah dan Kepala BPKPD yang tidak bisa dibayarkan karena menjadi Temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang dilakukan pada pemeriksaan di awal tahun 2023.

Diharapkan pada nantinya pada tahun 2023 capaian realisasi kinerja dan anggaran akan terus mengalami peningkatan dan dibutuhkan akselerasi perbaikan pada setiap kegiatan dan subkegiatan sehingga dapat diperoleh capaian yang optimal.

3.5 ANALISIS EFFISIENSI

Bappeda Provinsi Jambi memiliki ketersediaan instrumen sistem informasi dalam mendukung ketercapaian kinerja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi juga didukung oleh SDM Fungsional Perencana yang saat ini berjumlah sebanyak 15 (lima belas orang) orang, dan SDM Fungsional Analisis Kebijakan Publik sebanyak 1 (satu) orang.

Secara matriks analisis efisiensi dari 3 program, 12 kegiatan dan 43 subkegiatan pada sasaran strategis, indikator kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.31
Tingkat Efisiensi Anggaran Persasaran serta Indikator Kinerja
Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

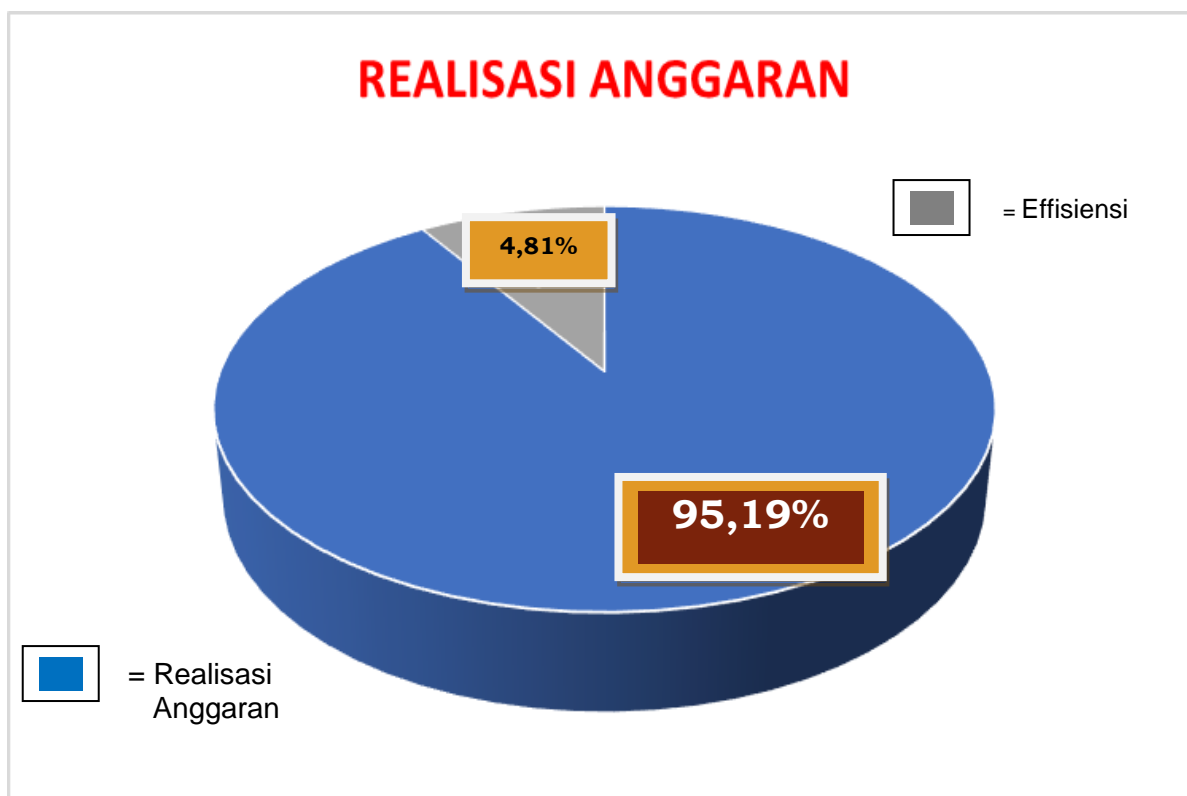
| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN KINERJA | EFFISIENSI |
|--|--|---|--------------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 1 | Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang integratif dan Akutanbel berbasis tekhnologi informasi | Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RPJMD | 2.961.215.000,- | 98,95% | 100% | 1,05% |
| | | Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD | 565.185.135,- | 99,27% | 100% | 0,73% |
| | | persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah | 559.769.353,- | 99,78% | 100% | 0,22% |
| | | Persentase Konsistensi Program RPJMD Dalam RPKD | 2.052.317.806,- | 72,46% | 100% | 27,54% |
| | | Persentase Keselarasan Rencana Tahunan dengan hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya | 2.031.504.600,- | 92,45% | 100% | 7,55% |
| | | Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral dengan rencana spasial | 1.002.183.900,- | 85,89% | 100% | 14,11% |
| | | Presentase Keterisian data dan Rencana dalam SIPD | 297.903.301,- | 91,54% | 100% | 8,46% |
| | 2 | Meningkatnya akutanbilitas dan kapabilitas instansi Bappeda Provinsi Jambi | Predikat AKIP Perangkat Daerah | 210.360.247,- | A (80,90) | 100% |
| Presentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dipublikasikan dan tepat waktu | | | 13.890.253.293,- | 97,52% | 100% | 2,48% |
| Presentase Peningkatan Fungsional Tertentun Pada Perangkat Daerah | | | 0,- | 0 | 100% | 100% |
| | | | 24.039.011.854 | 95,19% | 100% | 4,81% |

Sumber : Data diolah, LPPK, Renja Bappeda Tahun 2023.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

Grafik Diagram 3.2

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023.



Sumber : Data diolah, LPPK, Renja Bappeda Provinsi Jambi.

Kinerja Bappeda Provinsi Jambi selama Tahun 2023 didukung berbagai program dan kegiatan, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program kegiatan untuk mendukung setiap sasaran berjalan dengan baik. Besaran anggaran yang menunjang pencapaian sasaran sebesar Rp 24.039.011.854,-. Pada akhir Tahun 2023, anggaran ini terealisasi sebesar Rp.22.882.830.030,- atau sebesar 95,19%. Jika dilihat realisasi anggaran persasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar ada pada Sasaran 1, Yaitu Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Integratif Dan Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi tepat pada indikator kinerja persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah Sebesar 99,78%. Kemudian Penyerapan anggaran paling terendah terjadi pada sasaran 1, yaitu Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral dengan rencana spasial yaitu sebesar 85,89 %.

ANALISIS EFFISIENSI

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 3 program, terdapat 12 kegiatan dan 43 subkegiatan yang capaian kinerjanya sudah melebihi target. Berikut diinformasikan sasaran dan indikator kinerja yang mana capaian kinerjanya melebihi target Renstra Bappeda tahun 2023 serta tingkat efisiensi yang baik dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran “Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang integratif dan Akutanbel berbasis teknologi informasi” tercapainya melalui keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RPJMD dengan persentase 100% dengan efisiensi sebesar 1,05%.
2. Sasaran “Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang integratif dan Akutanbel berbasis teknologi informasi” tercapainya melalui keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD dengan persentase 100% dengan efisiensi sebesar 0,73%.
3. Sasaran “Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang integratif dan Akutanbel berbasis teknologi informasi” tercapainya melalui persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah dengan persentase 100% dengan efisiensi sebesar 0,22%.
4. Sasaran “Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang integratif dan Akutanbel berbasis teknologi informasi” tercapainya melalui Persentase Konsistensi Program RPJMD Dalam RKPD dengan persentase 100% dengan efisiensi sebesar 27,54%.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

5. Sasaran “Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang integratif dan Akutanbel berbasis teknologi informasi” tercapainya melalui Persentase Keselarasan Rencana Tahunan dengan hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya dengan persentase 100% dengan efisiensi sebesar 7,55%.
6. Sasaran “Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang integratif dan Akutanbel berbasis teknologi informasi” tercapainya melalui Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektorial dengan rencana spasial dengan persentase 100% dengan efisiensi sebesar 14,11%.
7. Sasaran “Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang integratif dan Akutanbel berbasis teknologi informasi” tercapainya melalui keterisian data dan rencana dalam SIPD dengan persentase 100% dengan efisiensi sebesar 8,46%.
8. Sasaran “Meningkatnya akutanbilitas dan kapabilitas instansi Bappeda Provinsi Jambi” tercapainya Predikat AKIP Perangkat Daerah dengan persentase 100% dengan efisiensi sebesar 100%.
9. Sasaran “Meningkatnya akutanbilitas dan kapabilitas instansi Bappeda Provinsi Jambi” tercapainya Predikat AKIP Perangkat Daerah dengan persentase 100% dengan efisiensi sebesar 2,48%.
10. Sasaran “Meningkatnya akutanbilitas dan kapabilitas instansi Bappeda Provinsi Jambi” tercapainya Predikat AKIP Perangkat Daerah dengan persentase 100% dengan efisiensi sebesar 100%.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Penyelenggaraan program kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tahun 2022-2026, keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari analisis sasaran perangkat daerah meningkatnya kualitas perencanaan yang parstipatif, selaras dan berdampak. Dengan indikator persentase kesesuaian capaian perencanaan pembangunan daerah, realisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tahun 2023 adalah sebesar 95,19%.
2. Realisasi kinerja Badan Perencanaaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 90%.
3. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti terbatasnya Sumber Daya Manusia Perencana pembangunan yang memiliki kompetensi, Belum terpenuhinya kebutuhan ragam data dan informasi statistik dari beberapa bidang terkait terutama untuk data mikro, belum maksimalnya pemahaman para *stakeholder* terhadap sistem perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, belum maksimalnya komunikasi dan kordinasi antar bidang terkait dalam ruang lingkup Bappeda Provinsi Jambi.

4.4 TINDAK LANJUT KEDEPAN

Dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dimasa yang akan datang, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan peran koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota agar perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan bisa dijalankan dengan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi.
2. Mengoptimalkan tindak lanjut pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui optimalisasi evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah serta kualitas hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah.
3. Mensosialisasikan dan melakukan upaya maksimal terhadap pencapaian sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi “Indeks Kualitas Perencanaan” yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022-2026, agar sasaran strategis tersebut bisa dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga tujuan Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas bisa diwujudkan.
4. Melakukan koordinasi internal yang intensif agar peningkatan kinerja baik pada level Staf sampai Esselon 3 bisa terus ditingkatkan.
5. Mempersiapkan tenaga Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam perencanaan pembangunan, memaksimalkan data informasi statistik dari beberapa bidang terkait, memaksimalkan sosialisasi kepada *stakeholder* tentang system perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aturan *normative*, meningkatkan komunikasi dan kordinasi antar bidang terkait dalam ruang lingkup Bappeda Provinsi Jambi;
6. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas, melalui pendekatan 4 (empat) pilar *Balance Score Card* (BSC) yang meliputi pendekatan *customer perspective*, *internal process*, *financial perspective*, dan *learning and growth perspectiv*;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

7. Optimalisasi hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada tahun berikutnya;
8. Selalu mengedepankan aspek responsif dan adaptatif terhadap perubahan situasi dan kondisi daerah dalam sisi perencanaan.

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Esselon II
2. Indikator Kinerja Utama OPD.
3. Rencana Aksi Tahun 2023